

**TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2008
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Hukum Islam Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh
EKA MUSTAFIA
NIM. 10300107011

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Penyusun skripsi yang berjudul “ Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Perspektif Hukum Islam”

Nama : Eka Mustafia
Tempat/Tanggal lahir : Sengkang, 12 januari 1989
NIM : 10300107011
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum/ Pidana dan Ketatanegaraan
Angkatan : 2007
Alamat : Kompleks P & K Blok I 2 No. 3

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian dan secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Makassar, 10 Nopember 2012
Penyusun

Eka Mustafia



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi berjudul “ Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Perspektif Hukum Islam” dengan lancar.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Sarjana guna meraih gelar Sarjana Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Atas selesainya skripsi ini terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua yang tercinta Ayahanda Syarifuddin dan Ibunda Hafсах serta kedua saudaraku adik Chaidir Adha dan Muh. Yasin Anugrah yang selalu memberikan doa, perhatian, kasih sayang dan kesabaran luar biasa kepada penulis
2. Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag dan Dra. Nila Sastrawati, M. Si selaku dosen pembimbing, atas arahan, bimbingan, dan masukan rencana penelitian hingga penyusunan skripsi ini.
3. Kanda Syamsul Bahri, SH. sahabat Deli, Nayu, Ria, Wiyah, Yaya, Subhan, Sadar, Aksan, Fadli, Anton, serta Keluarga Besar Fakultas Syari’ah dan Hukum Khususnya jurusan HPK Angkatan 2007 yang telah memberikan kebersamaan yang luar biasa dan pengalaman yang tidak terlupakan.
4. Para dosen dan staf kepegawaian Fakultas Syari’ah dan Hukum yang selama ini memberikan ilmu pengetahuan

Dengan selesainya skripsi ini diharapkan saran dan kritik yang membangun. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, semoga skripsi ini bermanfaat untuk penulisan selanjutnya

Makassar, Oktober 2012

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Kajian pustaka	9
E. Metode penelitian	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
G. Garis-garis Besar Skripsi	14
BAB II PORNOGRAFI DAN BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA PORNOGRAFI	
A. Pengertian Tindak Pidana Pornografi	15
B. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pornografi	18
C. Unsur-unsur Tindak Pidana Pornografi	27
BAB III PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI	
A. Faktor-faktor yang Menyebabkan terjadinya Tindak pidana Pornografi.....	32
B. Dampak yang Ditimbulkan Oleh Tindak Pidana Pornografi	36
C. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi	41
BAB IV TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Tindak Pidana Pornografi Menurut Hukum Islam	44
B. Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pornografi	47

C. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Dalam Islam	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



ABSTRAK

Nama : Eka Mustafia
NIM : 10300107011
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum / HPK
**Judul : TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENURUT
UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2008 PERSPKTIF HUKUM
ISLAM**

Skripsi ini membahas tentang Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Perspektif Hukum Islam. Tindak Pidana Pornografi merupakan tindak pidana yang mengandung segala perbuatan yang berhubungan dengan pornografi yang dilarang oleh Undang-undang pornografi dan diancam dengan pidana tertentu terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pokok permasalahan yang ingin diteliti adalah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pornografi dalam masyarakat, dampak yang ditimbulkan tindak pidana pornografi dalam masyarakat dan pandangan islam terhadap tindak pidana pornografi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti sesuai kenyataan yang terdapat dalam masyarakat. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis yaitu penulis berpedoman pada peraturan yang berlaku, metode syar'i yaitu pendekatan yang berdasarkan pada norma agama baik dalam bentuk nash (Alquran dan sunnah) maupun pendapat para ulama dan ahli ushul fikih melalui karya-karya mereka, dan pendekatan filosofis merupakan upaya sadar yang dilakukan untuk menjelaskan apa dibalik sesuatu yang nampak. Dalam metode ini penulis menggunakan metode library research yaitu mengadakan penelitian terhadap sejumlah literature bahan pustaka dan melakukan penelusuran data yang bersifat teoritis dengan menggunakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.

Hasil penelitian diperoleh tentang faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pornografi yaitu keterbatasan lapangan kerja yang dapat memicu seseorang melakukan tindak pidana pornografi yaitu keterbatasan lapangan kerja yang dapat memicu seseorang melakukan tindak pidana pornografi seperti menedarkan dan membuat video compact disc (VCD)mporno, keterbatasan pengetahuan tentang agama juga merupakan salah satu pemicu seseorang melakukan tindak pidana pornografi baik berupa kekerasan seksual maupun pelecehan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan kepada pemerintah untuk membatasi peredaran pornografi, pelanggaran terhadap tindak pidana pornografi dikenakan sanksi yang lebih berat dari sebelumnya dan mengajak masyarakat untuk tanggap dan secara aktif bertindak akan hal-hal yang merusak moral masyarakat.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan salah satu sumber pembentukan hukum nasional di Indonesia di samping hukum adat dan hukum Barat. Dalam ajaran Islam, hukum Islam merupakan salah satu unsur agama Islam yang terkait erat dengan unsur kaidah dan akhlak.¹

Dalam mempelajari hukum Islam, harus dipahami lebih dahulu makna Islam karena Islam itu sebagai agama yang menjadi induk atau sumber hukum Islam. Dalam sistem ajaran hukum Islam, hukum adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari iman atau agama dan dari kesusilaan atau akhlak. Karena ketiga komponen inti ajaran Islam yakni iman atau agama, hukum dan akhlak atau kesusilaan merupakan satu rangkaian kesatuan yang membentuk agama Islam, agama islam itu sendiri tanpa hukum dan kesusilaan bukanlah agama Islam.

Agama Islam adalah agama penutup dari semua agama-agama yang diturunkan berdasarkan wahyu ilahi (Alquran) kepada Nabi Muhammad saw, melalui malaikat Jibril untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman hidup lahir batin dari dunia sampai akhirat sebagai agama yang sempurna. Agama Islam bersumber dari wahyu (Alquran) dan sunah, sedangkan ajaran Islam bersumber dari *ra'yu* (akal pikiran) manusia melalui ijtihad, dan kerangka dasar agama Islam diantaranya adalah akidah, syariah, dan akhlak.

Akidah adalah iman atau keyakinan yang menjadi pegangan hidup setiap pemeluk agama Islam. Syariah merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Sedangkan akhlak merupakan perangai, sikap, tingkah laku, watak, budi pekerti manusia terhadap khalik (pencipta alam semesta) dan makhluk (yang diciptakan).

¹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum islam di Indonesia* (cet. 6 ; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), h.29.

Berkaitan dengan akhlak, pada saat ini telah memasuki era baru yang jauh berbeda dengan zaman sebelumnya yang banyak memberikan pengaruh dalam lingkungan masyarakat. Era globalisasi dan modernisasi memberikan perubahan-perubahan bagi masyarakat baik dalam sistem ekonomi, sosial, maupun budaya. Perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh proses globalisasi sebagai efek perkembangan teknologi informasi yang tidak terelakkan, sehingga dapat merusak akhlak seseorang.

Hancurnya atau rusaknya akhlak seseorang tersebut dikarenakan adanya musuh-musuh Islam yang senantiasa membisikkan kesesatan untuk meruntuhkan kekuatan kaum muslimin yang senantiasa berpegang pada *al-akhlaqul karimah* dan jalan hidup Islam yang lurus yaitu dengan menggunakan sarana dan prasarana yang disampaikan media komunikasi dan informasi baik melalui media elektronik maupun media cetak yang bersifat pornografi.

Islam memberikan definisi yang jelas dan tidak mengambang tentang pornografi. Pornografi adalah produk grafis (tulisan, gambar, film) baik dalam bentuk majalah, tabloid, VCD (*Video Compact Disk*), film-film acara-acara di TV, situs-situs porno di internet, ataupun bacaan-bacaan porno yang lainnya yang mengumbar sekaligus menjual aurat, artinya aurat menjadi titik pusat perhatian.

Konsep pornografi paling umum dikenal karena sifatnya yang mudah dicerna. Bentuk pencabulan atau tindakan-tindakan yang jorok dengan menonjolkan objek seks yang biasa disebut dengan porno, ide-ide yang dituangkan melalui gambar dan terutama ketika pada abad ke 14 ditemukan mesin cetak maka pada saat itu masyarakat telah biasa memproduksi hasil cetakan sehingga sejak dahulu masyarakat sudah terbiasa dengan pornografi.²

Pornografi merupakan masalah lama yang belum dapat ditanggulangi oleh ketentuan-ketentuan yang ada yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-indie*) yang disingkat dengan KUHP yang berlaku di Indonesia sejak masa pemerintahan Hindia-Belanda, yaitu

²Burhan Bungin, *Pornomedia* (cet. 1 ; Jakarta : Prenada Media, 2005), h. 113.

Januari tahun 1917. Setelah Indonesia merdeka, KUHP diberlakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 jo. Undang-undang Nomor 73 tahun 1985.³

Masalah pornografi masih banyak menimbulkan pro dan kontra di berbagai pihak, ada yang mengatakan pornografi merupakan suatu seni. Dengan mengatasnamakan seni bukan pornografi maka mereka berlindung dibalik karya seni yang agung demi menghalalkan karya mereka yang merusak moral bangsa. Pornografi cenderung dikaitkan dengan perbuatan zina karena dengan melihat, mendengar, membaca hal-hal yang berkaitan dengan pornografi maka akan memicu seseorang untuk melakukan perbuatan zina yang sangat di larang oleh agama. Dalam perspektif Alqur'an, batasan pornografi sudah sangat jelas sebagaimana dinyatakan dalam QS Al-Nur (24) : 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحِفْظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
 آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
 أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ
 الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تَخْفِينَ مِنْ
 زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Terjemahannya :

”Katakanlah kepada wanita yang beriman “ hendaknya mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari pandangannya. Dan hendaknya mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau suami ayah mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan

³Neng Djubaedah., *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam* (cet. 3 ; Jakarta : Kencana Prenadana Media Group, 2009), h.2.

(terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.⁴

Dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang dikodifisir, yaitu sebagian besar aturan-aturannya telah disusun dalam suatu kitab Undang-undang hukum pidana.⁵

Demikian pula hukum pidana Barat dalam KUHP telah dijadikan sumber hukum primer dalam penyusunan RUU-KUHP. Keberadaan kedua sistem hukum pidana tersebut tampak dalam pendapat Bambang Poernomo, bahwa sumber utama hukum pidana di Indonesia terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya. Tetapi, disamping itu masih memungkinkan sumber hukum Adat atau hukum Rakyat yang masih hidup sebagai delik Adat yang dalam praktik putusan pengadilan didasarkan pada hubungan delik Adat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Pasal 5 ayat (3b).⁶

Menurut pasal 1 angka 1 UUP, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pornografi merupakan suatu objek tindak pidana yang diletakkan setelah unsur perbuatan. Sering kali objek tindak pidana menyatu dengan objek perbuatan. Misalnya, pasal 31 UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi (UUP). Frasa “pornografi” merupakan unsur “objek tindak pidana” yang sekaligus merupakan “objek perbuatan” meminjamkan atau mengunduh. Akan tetapi adakalanya dibedakan secara jelas antara objek tindak pidana dengan objek perbuatan.

⁴Departemen Agama Republik Indonesia. *A-IQur'an dan Terjemahan* (cet. 1 ; jakarta :Asy-Syifa, 1990), h.543

⁵Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (cet. 5 ; Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1993), h.16.

⁶Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum Pidana* (cet. 7 ; Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), h. 23.

Undang-undang Antipornografi dan Pornoaksi (UU APP) mengandung maksud untuk menjaga martabat dan keselamatan serta untuk memuliakan perempuan. Fakta menunjukkan, bahwa perempuan lebih banyak yang menjadi obyek dan korban kejahatan seksual ketimbang laki-laki. UU APP itu pun membantu perempuan dan laki-laki agar mampu memelihara kehormatan dan harga diri, serta menghindari segala hal yang mengundang datangnya gangguan dan pelecehan.⁷

UUP memberi batasan perihal pornografi, dan tidak memberi batasan mengenai tindak pidana pornografi. UUP merumuskan tentang macam atau bentuk tindak pidana pornografi. Meskipun di dalam UUP tidak terdapat batasan pengertian tindak pidana pornografi. Berdasarkan jenis-jenis tindak pidana pornografi yang dirumuskan dalam UUP tersebut, secara umum dapat diberi batasan. Tindak pidana pornografi adalah tindak pidana yang mengandung segala perbuatan yang berhubungan dengan pornografi yang dilarang oleh UUP dan diancam dengan pidana tertentu terhadap barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁸

Apabila didasarkan pada batasan pengertian tentang pornografi, tindak pidana pornografi dapat diberi batasan yang lebih konkret, yakni perbuatan dengan wujud dan cara apapun mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dilarang oleh UUP dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

Meskipun kepentingan hukum yang hendak dilindungi dapat dirinci dan digolong-golongkan menjadi tiga golongan besar. Namun demikian, antara kepentingan hukum yang satu dengan yang lain tidak terpisahkan. Mengingat,

⁷Nurun Najwa, *pornografi dan pornoaksi Dalam Perspektif Hadis Dalam Musawa jurnal studi Gender dan islam (cet. 1 ; Yogyakarta, t p., 2002), h. 9.*

⁸Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi selanjutnya disebut pornografi (cet. I ; Surabaya : PMN,2009), h. 3.*

pelanggaran terhadap suatu kepentingan hukum sekaligus melanggar suatu kepentingan hukum yang lain.⁹ Tidak mungkin terjadi pelanggaran satu kepentingan hukum saja oleh suatu perbuatan dalam tindak pidana tertentu tanpa melanggar kepentingan hukum lainnya. Misalnya, pembuat pornografi pada dasarnya menyerang rasa kesusilaan umum (masyarakat) yang sekaligus menyerang rasa kesusilaan masing-masing individu atau pribadi anggota masyarakat. Ada nilai-nilai kesusilaan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat yang harus dipatuhi. Nilai-nilai kesusilaan adalah isi dari norma kesusilaan.

Nilai-nilai kesusilaan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat dapat mencerminkan sifat dan karakter dari suatu lingkungan masyarakat bahkan suatu bangsa. Patokan patut atau tidak patutnya suatu perbuatan dianggap menyerang atau tidak terhadap kepentingan hukum mengenai rasa kesusilaan tidak semata-mata bersifat individual, tetapi ada juga nilai-nilai yang bersifat universal Misalnya, perkosaan bersetubuh.

Nilai-nilai itu hendak dilindungi dengan dibentuknya tindak pidana pornografi dalam UUP. Dengan demikian, nilai-nilai kesusilaan yang telah menjadi norma hukum yang bersanksi pidana tidak dilanggar sehingga lebih terjaminnya keseimbangan batin mengenai rasa kesusilaan bagi masyarakat. Terjaganya kedamaian dan ketentraman rasa batiniah masyarakat dan tidak diganggu dan diserang oleh perbuatan tertentu (tindak pidana). Dengan diangkatnya nilai-nilai moral kesusilaan ke dalam norma hukum keberlakuan norma dapat dipaksakan oleh negara.

Negara harus ikut campur dalam menegakkan nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan sebagai salah satu ciri peradaban dan kultur orang indonesia. Hal ini sebagai upaya pertahanan bangsa indonesia terhadap pengaruh yang bertubi-tubi dari peradaban asing. Ditinjau dari nilai-nilai kesusilaan yang sebagian besar diadopsi dari norma-norma agama yang dianut oleh orang indonesia banyak

⁹Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa selanjutnya disebut nyawa* (cet.1 ; jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004) , h. 3.

peradaban asing yang buruk. Sebagian bukan sekadar berlainan atau bertentangan, tetapi mengandung sifat destruktif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh dibentuknya tindak pidana pornografi dalam UUP yakni kepentingan hukum mengenai tegaknya nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan umum yang dijujung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Dengan terlindungi dan ditegakkannya nilai-nilai moral kesusilaan umum masyarakat akan dapat terlindungi dan ditegakkan pula perasaan kedamaian dan ketentraman seperti itu harus dapat dipertahankan dan tidak boleh terganggu oleh berbagai perbuatan yang berhubungan dengan pornografi.

B. Rumusan Masalah

Guna menghindari pembahasan yang tidak tepat, maka penulis perlu merumuskan permasalahan pokok yaitu: “Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Perspektif Hukum Islam” selanjutnya untuk membahas secara rinci dan terarah, maka penulis membagi pokok masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pornografi dalam masyarakat?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan tindak pidana pornografi dalam masyarakat?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap tindak pidana pornografi ?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis mengemukakan makna dan pengertian kata-kata yang dianggap penting dalam judul skripsi ini, untuk menjelaskan arti yang terkandung di dalamnya sehingga dapat terarah dengan baik.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰

¹⁰Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara selanjutnya disebut keamanan* (cet. 1 ; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002) , h. 1.

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹¹

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Alquran maupun sunah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia. Keuniversalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan langsung dari hakekat Islam sebagai agama yang universal, yakni agama yang substansi-substansi ajarannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua orang Islam di manapun, kapan pun, dan kebangsaan apapun.¹²

Ruang lingkup judul yang diuraikan penulis merupakan gambaran tentang tindak pidana pornografi, yang menuai kontroversi dalam masyarakat memberikan banyak dampak dalam kehidupan sosial dan budaya. Pornografi juga dapat menghancurkan generasi bangsa baik terhadap perilaku, moral (akhlak), maupun terhadap sendi-sendi serta tatanan keluarga dan masyarakat beradab.

Masalah pornografi di Indonesia telah melampaui ambang toleransi dan merusak akhlak bangsa. Namun penyelesaian terhadap masalah pornografi belum sesuai dengan yang diharapkan. Kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda terhadap pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi, dan dahulu masyarakat lemah dalam merespon pornografi.

Dalam upaya menanggulangi terjadi tindak pidana dalam masyarakat maka perlu adanya perlindungan hukum yang dapat memberi rasa aman dan tenteram dengan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum dan perlindungan

¹¹Hukum Pornografi Kumpulan Perundang-undangan Tentang Pornografi (cet. 1 ; Yogyakarta : Pustaka Mutika,2010), h. 5.

¹²Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (cet. 1 ; Jakarta : Penamadani, 2004),h. 6-7.

hukum merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Perlindungan hukum tidak dapat dirasakan tanpa kepastian hukum. Sebaliknya dengan tegaknya kepastian hukum maka perlindungan hukum akan dapat dinikmati masyarakat. Kepastian hukum disini di maksudkan penegakan hukum yang dapat diterima oleh golongan terbesar penduduk atau mayoritas dari penduduk.

D. Kajian Pustaka

pornografi merupakan masalah yang sangat urgen dan menarik untuk dijadikan bahan skripsi atau kajian dan menurut pengamatan penulis sampai sekarang belum ada yang membahas secara mendalam dan mengkaji secara spesifik.

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis dapat mengemukakan beberapa referensi yang dijadikan rujukan dalam mengkaji masalah pornografi, antara lain:

1. Adami Chazawi dalam bukunya Tindak Pidana Pornografi menjelaskan tentang tindak pidana pornografi menyerang nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan umum. Sama artinya menyerang kepentingan hukum atas rasa ketentraman dan kedamaian batin bidang kesusilaan umum. Dalam buku ini membahas tentang hukum normatif mengenai tindak pidana pornografi, baik dalam KUHP maupun dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang sangat berkaitan dengan karya ilmiah penulis.
2. Nurul Najwah, Pornografi Dan pornoaksi Dalam perspektif Hadis dalam jurnal Musawa Studi dan Gender Dalam Islam menjelaskan tentang pornografi dan pornoaksi di Indonesia, dapat dipandang sebagai unsur penjajahan budaya barat yang permisif, dan telah mengalami dekadensi moral yang banyak menimbulkan pro dan kontra. Dalam buku ini membahas tentang pornografi dan pornoaksi dalam hukum islam yang merupakan salah satu pembahasan dalam penulisan karya ilmiah ini.
3. Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan bagian daripada keseluruhan hukum

yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Buku ini membahas tentang hukum pidana normatif yang berkaitan dengan karya ilmiah tersebut.

4. Neng Djubaedah, dalam bukunya Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam menjelaskan sehubungan dengan pembahasan tentang pornografi dan pornoaksi, maka berdasarkan tafsiran tersebut, ketentuan hukum tentang pornografi dan pornoaksi di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum seluruh agama yang berlaku, termasuk ketentuan hukum pidana islam. Dalam buku ini membahas tentang pornografi dalam pandangan islam yang dibahas dalam karya ilmiah ini.

Adapun beberapa refensi yang digunakan penulis dalam mengkaji masalah tindak pidana pornografi dalam Islam tidak dijelaskan secara terperinci bagaimana tindak pidana pornografi dalam Islam.

E. Metode Penelitian

Didalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terdapat dalam masyarakat.

2. Pendekatan penelitian

Teknik pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi adalah

- a. Pendekatan yuridis, Dalam metode pendekatan ini penulis berpedoman pada peraturan yang berlaku.

- b. Pendekatan syar'i, Pendekatan yang berdasarkan pada norma agama baik dalam bentuk nash (Alquran dan sunah) maupun pendapat para ulama dan ahli ushul fikih melalui karya-karya mereka.
- c. Pendekatan filosofis adalah cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formanya. Dengan kata lain, pendekatan filosofis adalah upaya sadar yang dilakukan untuk menjelaskan apa dibalik sesuatu yang nampak.

3. Pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pustaka dengan kegiatan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui field research atau penelitian lapangan dengan cara interview, berarti ke lapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab kepada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh melalui angket yang dipandang meragukan.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui Library research atau penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku, Peraturan Perundang-undangan dan publikasi lainnya yang dipandang ada kaitannya dengan obyek penelitian yang dijadikan pembahasan.

a. Jenis Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam pembuatan skripsi ini adalah jenis data kualitatif digunakan untuk mendapat data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.¹³

¹³Sugiono, *metode penelitian kuantitatif,kualitatif dan R&D* (cet. 6 ; Bandung : ALFABETA, 2009), h. 9.

b. Sumber Data

Dalam metode ini penulis menggunakan metode *Library Research*, yaitu dalam mengadakan penelitian terhadap sejumlah literature bahan pustaka dan melakukan penelusuran data-data yang bersifat teoritis.

Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan dua teknik:

- a. Kutipan langsung, kutipan yang terdiri dari kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Kutipan langsung pendek adalah kutipan yang harus sama persis dengan kutipan aslinya dan ini biasanya untuk mengutip rumus, peraturan, puisi, definisi, pernyataan ilmiah dan lain-lain. Kutipan langsung pendek ini adalah kutipan yang panjangnya melebihi tiga baris ketikan. Kutipan ini cukup dimasukkan kedalam teks dengan memberi tanda petik diantara kutipan tersebut. Sedangkan kutipan panjang langsung adalah kutipan yang panjangnya melebihi tiga baris ketikan dan kutipan harus diberi tempat tersendiri dalam alinea baru.
- b. Kutipan tidak langsung, merupakan kutipan yang tidak persis sama dengan sumber aslinya. Kutipan ini merupakan ringkasan atau pokok-pokok yang disusun menurut jalan pemikiran penulis. Baik kutipan tidak langsung pendek maupun panjang harus dimasukkan kedalam kalimat atau alinea. Dalam kutipan tidak langsung pengutip tidak boleh memasukkan pendapatnya sendiri.

4. Metode pengolahan dan analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengolahan dan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu membandingkan data primer dan data sekunder, lalu diklasifikasikan kemudian dijabarkarkan dan disusun secara sistematis, sehingga diperoleh suatu pengetahuan. Langkah-langkah analisis data sebagai berikut :

- a. Mengorganisasi data yang diperoleh dari rekaman maupun data tertulis.
- b. Proses data dengan cara memilah-milah data.
Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal bahasan masalah dengan cara member kode-kode tertentu pada data tersebut.
Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi dan kesahian data yang akan didiskripsikan dalam menemukan jawaban permasalahan.
- c. Interpretasi data dengan cara menerjemahkan atau menafsirkan data yang sebelumnya telah dikategorikan.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pornografi dalam masyarakat.
- b. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan tindak pidana pornografi dalam masyarakat.
- c. Untuk mengetahui pandangan islam terhadap tindak pidana pornografi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dikemukakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah untuk memahami dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pornografi dan cara mengatasinya.

G. Garis Besar Isi Skripsi

Penyusunan skripsi ini dapat di kelompokkan menjadi (V) bab dengan sub-subnya di samping pendahuluan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab I, menguraikan pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, definisi operasional dan ruang lingkup, kajian pustaka,

metode penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta garis-garis besar isi skripsi.

Bab II, mengenai pornografi dan bentuk tindak pidana pornografi, berisi tentang pengertian tindak pidana pornografi, bentuk-bentuk tindak pidana pornografi, Unsur-unsur tindak pidana pornografi

Bab III, penanggulangan tindak pidana pornografi, berisi tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pornografi, dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pornografi, sanksi bagi pelaku tindak pidana pornografi.

Bab IV, tindak pidana pornografi ditinjau dari segi hukum islam yang berisi tentang tindak pidana pornografi ditinjau dari hukum islam serta upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pornografi serta sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pornografi dalam islam.

Bab V, Bab penutup yang merupakan kesimpulan terhadap pembahasan sebelumnya, saran-saran sebagai salah satu kelengkapan dalam penyusunan skripsi.

BAB II

PORNOGRAFI DAN BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA

PORNOGRAFI

A. Pengertian Tindak Pidana Pornografi

Pornografi merupakan penyajian tulisan, patung, gambar, foto, foto gambar hidup (film) atau rekaman suara yang dapat menimbulkan nafsu birahi dan menyinggung rasa sosial masyarakat.

Pornografi semula mengacu pada karya-karya sastra Yunani kuno yang menggambarkan tingkah laku pelacur. Dalam bahasa Yunani kuno, pornografi terdiri dari dua suku kata, *porne* dan *graphein*. *Porne* berarti “ gadis liar, nakal, penjaja seks atau pelacur (*a prostitute*) “ dan *graphein* artinya ungkapan. Asal mula arti pornografi dengan demikian adalah “ tulisan, atau gambar-gambar, dan lain sebagainya, tentang penjaja seks, gadis liar, atau sering juga disebut pelacur”.¹⁴

Di Yunani pada abad keempat sebelum masehi, terdapat seorang perempuan cantik jelita bernama *Phryne* dari *Thespiae*. Ia seorang *hetaera*, yaitu perempuan yang kehidupannya hanya untuk bersenang-senang dengan laki-laki. *Hetaera* berbeda dengan *porne*, yaitu perempuan pelacur yang digunakan dan untuk dibayar setiap hari, dan berbeda pula dengan seorang istri yang berfungsi sebagai pemelihara rumah tangga dan keturunan yang dapat dipercaya.¹⁵ *Phryne* pernah dituduh sebagai perempuan yang mengkorupsi para jejaka Athena. Ketika pengadilan akan menjatuhkan hukuman kepada *Phryne*, pembela *Phryne* bernama *hyperides* mengajukan pembelaan dengan cara meminta *Phryne* berdiri di suatu tempat di depan sidang dengan posisi yang dapat dilihat oleh semua yang hadir. *Phryne* menanggalkan semua pakaian satu persatu, sehingga seluruh keindahan

¹⁴A.Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana, Studi Perbandingan* (Cet ; 1, Jakarta : Bina Mulia, 1987), h. 7

¹⁵Alex A. Rachim, *Pornografi Dalam pers, Sebuah orientasi* (Cet ; 1, Jakarta : dewan Pers, 1977), h. 10-11

tubuhnya tampak oleh hakim dan seluruh yang hadir. Dan hasilnya, *Phryne* dibebaskan dari hukuman. Inilah merupakan awal dari *streaptease show*.¹⁶

Pada masyarakat Yunani klasik, mereka berpandangan naturalistik dalam arti tidak menganggap seks atau hubungan seks secara terang-terangan sebagai sesuatu yang mesum. Kaum wanitanya suka memuji patung Priapus sebagai dewa kesuburan. Patung ini berupa kepala seorang laki-laki yang berjanggut yang diletakkan di atas sebuah alas dan di tengah alas terdapat alat kelamin laki-laki.

Sementara dalam masyarakat Romawi terdapat lukisan-lukisan di dinding kuil Pompei yang menggambarkan cara-cara bersenggama. Lukisan-lukisan ini merupakan bukti sejarah tentang pornografi dalam kebudayaan Romawi.¹⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis (berkenaan dengan sensasi seks dan nafsu birahi) dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi, bahan yang dirancang dengan sengaja atau semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.¹⁸

Dalam bahasa Inggris, ada istilah *obscenity* selain pornografi. *Obscenity* mengacu kepada segala sesuatu yang tidak senonoh, mesum, dan melanggar kesopanan. Undang-undang yang menentang *obscenity* hanya terdapat di Amerika Serikat dan Inggris. Tetapi Undang-undang ini hanya berlaku untuk kesopanan di bidang seksual.

Pornografi merupakan publikasi atau penampilan materi seksual secara eksplisit yang tidak berhubungan dengan tujuan sastra, artistik dan seni, ilmu pengetahuan dan politik.

letak kekuatan pornografi adalah pada kemampuannya yang besar untuk membangkitkan birahi dari mereka yang menatap, mendengar, dan menikmatinya.¹⁹

¹⁶ *ibid*

¹⁷ Badiatul Muchlisin Asti, *Gurita Pornografi Membelit Remaja* (cet, 1 ; Grobongan : Oase Qalbu, 2010), h. 31.

¹⁸ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (cet; 1, Jakarta : Balai Pustaka, 1993), h.484.

¹⁹ Syarifah, *Kebertubuhan Perempuan Dalam pornografi* (cet. 1 ; Bandung : Mizan, 1995), h. 21.

Menurut Rofiah, pornografi adalah segala jenis tulisan, gambar, suara dan bunyi yang melanggar ketentuan syariat Islam mengenai aurat, hubungan seksual serta larangan untuk memberi stimulan seksual dalam kehidupan umum.

penyajian seks secara terisolir dalam tulisan, gambar, foto, film, pertunjukan atau pementasan dengan tujuan komersial. Tujuan komersial artinya mereka yang ingin menonton pertunjukan seksual ini harus mengeluarkan sejumlah uang, paling tidak untuk mengakses internetnya.

Sementara itu dalam Rancangan Undang-undang tentang penanggulangan pornografi dan pornoaksi menyatakan bahwa pornografi adalah :

Pornografi adalah visualisasi dan verbalisasi melalui media komunikasi, atau karya cipta manusia tentang perilaku atau perbuatan laki-laki dan/ atau perempuan yang erotis dan/ atau sensual dalam keadaan atau memberi kesan telanjang bulat, dilihat dari depan, samping, atau belakang, penonjolan langsung alat-alat vital, payudara atau pinggul dan sekitarnya baik dengan penutup atau tanpa penutup, ciuman merangsang antar pasangan sejenis atau berlainan jenis, baik antar muhram maupun antar bukan muhram, atau antar manusia dengan hewan, antar binatang yang ditujukan oleh orang yang membuatnya untuk membangkitkan nafsu berahi orang, atau antar manusia yang hidup dengan manusia yang telah meninggal dunia, gerakan atau bunyi dan/ atau desah yang memberi kesan persenggamaan atau percumbuan, gerakan masturbasi, onani, lesbian, homoseksual, oral seks, sodomi, *fellatio*, *cunnilingus*, *coitus interruptus*, yang bertujuan dan/ atau mengakibatkan bangkitnya nafsu berahi dan/ atau yang menimbulkan rasa yang menjijikkan dan/ atau memuakkan dan/ atau memalukan bagi yang melihatnya dan/ atau mendengarnya dan/ atau menyentuhnya, yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama dan/ atau adat istiadat setempat. (penjelasan : kata “menyentuh,” misalnya menyentuh patung atau benda lain sebagai hasil karya cipta manusia, diantaranya alat kelamin buatan, oleh orang tunanetra dan tunarungu).²⁰

Pornografi merupakan perbuatan yang menimbulkan mudharat dan keonaran dalam kehidupan masyarakat. Pornografi biasanya selalu berakhir dalam bentuk kekerasan dalam kehidupan seksual yang bersifat kriminal. Dampak yang lebih mendasar dari gelombang pornografi sebenarnya lebih terletak pada kemampuan pornografi dalam membentuk dan menyesatkan kehidupan masyarakat.

²⁰Neng Djubaedah., *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam* (cet. 3 ; Jakarta : Kencana Prenadana Media Group, 2009), h.245.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pornografi adalah tindakan perbuatan yang sangat kuat pengaruhnya terhadap pembentukan sikap mental manusia. Dengan tindakan yang mengarah pada hal-hal yang merusak, melalui imajinasi maupun aktifitas seksual secara liar dalam bahasa agama disebut zina.

Selama beberapa dasawarsa belakangan ini tumbuh pula industri porno dengan pesat di sejumlah Negara maju dan di perkirakan menghasilkan 7 miliar dolar AS setahun yang diproduksi industri juga mencakup obat dan alat bantu pemuas hubungan seksual.

Masyarakat kita tampaknya telah terkontaminasi oleh cara hidup materialisme dan hedonisme yang memaknai hidup ini materi dan sekedar mencari kesenangan belaka. Dengan mengabaikan moralitas, akhlak sebagai insan beragama dan etika sosial masyarakat.

Bila pornografi didefinisikan dengan perspektif hawa nafsu dan subyektifitas orang per orang dari sudut pandang masing-masing, pornografi memang akan menimbulkan debat yang tak kunjung selesai. Beda bila Islam dijadikan sebagai standar atau tolak ukur dalam memandang pornografi, maka masalah pornografi akan selesai dan tak perlu menjadi perdebatan yang dapat menguras energi.

Dari berbagai pandangan tentang pornografi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa “pornografi adalah segala sesuatu, baik tulisan maupun gambar, yang dapat membangkitkan nafsu birahi orang yang melihat atau membacanya”

B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pornografi

Beredarnya gambar-gambar porno yang beredar di berbagai media cetak maupun media elektronik di era globalisasi ini disadari atau tidak telah menggeser paradigma identitas “budaya timur” kita.²¹

Pada tahun 2003, sebuah artikel berjudul *Seksualitas Anak Muda dan Birahi kebudayaan* yang ditulis oleh Rachmad Hidayat memberikan wacana

²¹Nurun Najwa, *pornografi dan pornoaksi Dalam Perspektif Hadis Dalam Musawa jurnal studi Gender dan Islam* (cet. 1 ; Yogyakarta, t p., 2002), h. 23.

menarik tentang pandangan mengenai pornografi di Indonesia. Sang penulis menyebutkan bahwa isu pornografi lebih kental nuansa kulturalnya dibandingkan sisi hukumnya. Interpretasi secara budaya dikaitkan dengan bingkai moral yang terkandung dalam tradisi masyarakat Indonesia atau lebih sering dikaitkan dengan pengertian moral di dalam agama Islam.²²

Cara pandang pornografi menggunakan agama dan budaya akhirnya saling berbenturan saat harus menentukan nilai mutlaknya. Jika pornografi didefinisikan di dalam islam, sudah jelas bahwa ukuran yang dipakai adalah masalah aurat, cara berbicara, berpikir, dan segala hal yang berkaitan erat dengan hal yang dilarang agama. Detailnya meliputi cara berpakaian, hubungan antarmanusia (wanita dan laki-laki), *muhrim* dan tidak *muhrim*.

Sementara itu di dalam asli masyarakat Indonesia terdapat cara pandang yang berbeda terhadap pornografi. Masyarakat adat Bali, Kalimantan (Dayak), Irian Jaya, dan beberapa suku yang masih hidup di pedalaman memiliki nilai yang berbeda mengenai pengertian *visual* dan *verbalnya*. Bahkan kita dapat mengamati desain grafis hasil karya seni berbagai suku di Indonesia yang terkadang mengeksploitasi tubuh wanita telanjang sebagai salah satu unsurnya.

Menurut UUP, pengertian objek pornografi lebih luas daripada objek pornografi menurut KUHP. KUHP menyebut tiga objek, yaitu tulisan, gambar, dan benda. Adapun yang termasuk objek ialah adapun yang termasuk benda ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan, yang dibahas dalam pasal 283, 534, 535 KUHP. Objek pornografi dalam UUP telah diperluas sedemikian rupa termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi.

Dalam objek pornografi mengandung tiga sifat, yaitu isinya mengandung kecabulan, eksploitasi seksual, dan melanggar norma kesusilaan. Sementara itu, KUHP menyebutnya dengan melanggar kesusilaan. Antara benda pornografi dengan sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan merupakan suatu

²²Soni Set., 500+ *Gelombang Video Porno Di Indonesia* (cet. 1 ; Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2007), h. 13.

kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena memuat kecabulan, maka melanggar norma kesusilaan, kecabulan merupakan isi dari pornografi. Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam suatu wujud, misalnya dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan. Pada wujud inilah terdapat isi kecabulan. Misalnya, dalam gambar terdapat kecabulan bila gambar tersebut memuat secara eksplisit persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak.²³ Wujud dari kecabulan yang melekat pada suatu benda disebut benda pornografi. Misalnya, surat kabar, majalah, tabloid dan media cetak sejenisnya, film, dan/atau yang dipersamakan dengan film, video, VCD, DVD, CD, kaset dan rekaman *hand phone* dan/ atau alat komunikasi lainnya.

Pada objek tulisan ditambahkan unsur judul tulisan, kulit, dan isinya dapat terbaca oleh orang-orang yang hadir di situ. Unsur tersebut dinamakan unsur keadaan yang menyertai yang melekat pada objek tindak pidana. Dengan adanya frasa “judul tulisan”, “kulit” memberi petunjuk bahwa yang dimaksud judul dan kulit tersebut adalah judul dan kulit pada buku. Pada buku selalu ada kulit dan pada kulit ada judul buku atau tulisan lainnya yang berhubungan dengan judul dan penulisnya. Misalnya, si pembuat mempertunjukkan sebuah buku porno. Pada saat itu semua yang hadir dapat membaca tulisan judul, tulisan pada kulit, dan isinya dengan jelas. Orang-orang yang diperlihatkan buku tersebut dapat membaca tulisan atau melihat gambar porno pada kulit buku tersebut. Pengertian seperti itu sesuai dengan pendapat *Hoge Raad* dalam pertimbangan hukum suatu *arrestnya* yang mengatakan bahwa “mempertunjukkan hanya dapat dipidana jika judul yang dapat dibaca kulit atau tulisan, gambar atau benda yang dipertunjukkan. Artinya, langsung dapat diketahui oleh umum cukup untuk membangkitkan nafsu birahi para remaja.”²⁴

²³ Pasal 4 ayat (1) UUP

²⁴ Soenarto Soerodibroto, *KUHAP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad* (cet.1 ; Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1994), h. 330

Makna membangkitkan nafsu birahi adalah membangkitkan keinginan untuk bersetubuh. Tentunya dengan lawan jenis, tidak penting ingin bersetubuh dengan lawan jenis siapa.²⁵

Dalam KUHP maupun dalam UUP dijelaskan secara terperinci bentuk-bentuk pornografi baik dalam bentuk lisan maupun tulisan yang merebak dikalangan masyarakat yang memberi pengaruh buruk dalam kehidupan masyarakat bukan hanya dikalangan orang-orang dewasa, anak dibawah umur pun kecanduan pornografi.

Kecanggihan teknologi sekarang ini semakin memudahkan penyebaran pornografi, sehingga dengan mudah mendapatkan situs-situs pornografi baik berupa gambar bergerak maupun tulisan, dan gambar-gambar yang memiliki unsur pornografi.

Sementara itu, tumbuh dan berkembangnya warung internet dan *game center* di berbagai kota di Indonesia menjadi pusat bermain anak muda. Mereka menghabiskan waktunya untuk mendatangi tempat-tempat tersebut setelah sekolah atau saat larut malam. Waktu tak lagi dipedulikan internet dan *game center* menjadi sarana hiburan 24 jam. Mereka menjadi pecandu berbagai khayalan digital, bahkan membentuk komunitas sosial *cyber* lewat ruang-ruang *chatting online, friendster, yahoo, google, blog, Youtube*, dan tentu saja *Cyber Sex Entertiment*.

Anak-anak mudah mendapatkan pendidikan yang dipercepat lewat berbagai macam akses teknologi terkini. Peralatan multimedia jauh melampaui buku-buku pelajaran sekolah, meninggalkan carut-marut dunia pendidikan saat ini yang masih sibuk mengutak-utik kebenaran sejarah masa lalu dan huru-hara masa kini. Internet mebuat sebagian besar dari kita berkejaran dengan waktu untuk mengumpulkan berbagai macam hiburan, mengoleksi berbagai macam *content*, dan menikmatinya dengan cara masing-masing. Tetap dalam koridor konvensional ataukah atas nama syahwat dan kesenangan semata.

²⁵R. Sugandi, *KUHP dengan Penjelasannya* (cet, 1 ; Surabaya : Usaha Nasional, 1980), h. 541

Bertumbuh dan berkembangnya teknologi *handphone* mempermudah setiap orang untuk mengekspresikan rasa seni dan mengeksplorasi peralatan audio visual yang murah meriah, ringan, dan instan. Para pemakai *handphone* mendadak ikut serta dalam berkarya untuk menghasilkan apa saja atas nama seni instan. Membuat berbagai macam dokumentasi, memotret apa saja, hingga kecenderungan lain yang kadang menyimpang.

Handphone yang awalnya hanya digunakan sebagai alat komunikasi kini dapat juga digunakan sebagai alat untuk menyalurkan penyebaran video porno dengan mudah. Fasilitas yang sangat canggih yang dapat memutar musik, film dalam bentuk file yang dapat diputar di *handphone*, yang bisa disebut dengan *blue film* merupakan film-film porno yang dikemas dalam format ukuran file yang sudah di kompresi sehingga dengan mudah diputar di *handphone* ataupun di peralatan elektronik genggam lainnya.

Suram dan menghawatirkan mungkin adalah kata-kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi di masa depan. Diprediksi bahwa angka pertumbuhan video mini porno akan naik 10-100 kali lipat dalam 1-5 tahun ke depan. Harga *handset handphone* yang semakin murah, sekat-sekat moral etika yang semakin tipis, kegilaan para pelaku yang tidak atau sengaja melakukan perekaman kriminalitas, dan bisnis *film blue* adalah faktor yang akan menjadi wacana yang menggoncang kita setiap hari.

Industri seks yang melibatkan audio visual akan menjamur. Ribuan file mini video porno akan menjadi santapan sehari-hari bagi para pengunjung *handphone*. Akan semakin terjerat dan kecanduan untuk mengkonsumsi tayangan tersebut. Tidak ada cara untuk lari dan bersembunyi kecuali jika kita membuang *handset* yang berteknologi tinggi dan menukarnya dengan teknologi yang lebih rendah. Tentu saja, perbuatan ini sangatlah konyol. Bagaimanapun juga, jerat pornografi selalu membayangi dan masuk ke dalam alat elektronik yang kita miliki.

Pornografi dapat berkembang biak dengan cepat melalui media internet. Tidak seperti media tradisional yang menggunakan bahan cetak (*print media*), VCD/ DVD, atau berbagai macam produk 3 dimensi yang lain, Internet dapat

digunakan sebagai alat distribusi, alat promosi, dan alat penentu kebijakan strategis dalam berbisnis secara virtual. Berbagai macam materi gambar, film, dan suara yang dihasilkan oleh industri pornografi kini bisa dikonversi menjadi file-file data yang dapat dikirim melalui internet. Berkembangnya system *bandwidth* yang besar dan semakin cepatnya akses Internet menyebabkan banyaknya pelanggan situs porno yang memilih untuk mendapatkan materi pornografi dengan melakukan proses *download*.²⁶

Internet ternyata menjadi media paling efektif dalam hal distribusi, penyebaran, dan promosi materi pornografi. Oleh karena sifatnya yang mendunia, murah dalam hal biaya akses, dan dapat menjangkau setiap pribadi yang menggunakan internet, maka industri pornografi secara besar-besaran memfokuskan bisnisnya di media internet. Sebuah fakta dan data yang tidak dapat dibantah pula internet telah disalahgunakan untuk menjerat jutaan pengakses. Awalnya adalah iklan, bujukan, dan rayuan sampai akhirnya terjadi pola kecanduan (*addicted*) untuk mendapatkan berbagai macam materi pornografi dengan cepat dan instan dengan murah. Untuk menambah jumlah pelanggannya, situs-situs porno melakukan berbagai macam promosi dengan mengirim beberapa materi pornografi secara gratis. Setiap hari, diprediksi sebanyak 4,5 juta e-mail dengan materi pornografi disebarkan ke seluruh pengguna internet di dunia. Sebagian besar berisi materi promosi dan membujuk para calon pelanggan untuk mengakses situs porno tersebut. Sementara itu, situs pornografi menjadikan anak-anak sebagai objek seks (*pedofilia*) dikunjungi oleh 116.000 pengguna internet setiap hari. Secara total, pendapatan situs seks di seluruh dunia mencapai US\$49 trilyun dengan Amerika Serikat sebagai produsen situs seks terbesar di dunia.²⁷

Pelanggaran norma seks dan pornografi dalam masyarakat maya terjadi dalam skala yang tidak dapat diatasi, baik melalui penutupan jaringan-jaringan seks dan pornografi itu, sampai pada tingkat kebijakan. Kesulitan ini muncul karena jaringan (*pintu*) yang dapat mengakses seks dan pornografi begitu banyak

²⁶Sony Set., 500+ *Gelombang Video Porno Di Indonesia* (cet. 1 ; Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2007), h. 63.

²⁷*ibid*

dan begitu luas, sehingga pertanyaannya dari mana kita menutup jaringan-jaringan tersebut. Kesulitan lain, karena ternyata *provider* dan *website* yang secara spesifik juga secara langsung atau tidak, menghidupi diri mereka dan meraup keuntungan materi yang begitu banyak dari situs-situs seks dan pornografi ini. Sebagai contoh, di internet juga ada ratusan *website* yang secara spesifik menjual gambar erotika dan informasi porno.²⁸

Media elektronik maupun cetak saat ini banyak disorot sebagai salah satu penyebab utama menurunnya moral umat manusia termasuk juga remaja. Berbagai tayangan yang sangat menonjolkan aspek pornografi diyakini sangat erat hubungannya dengan meningkatnya berbagai kasus kekerasan seksual.

Dengan semakin majunya teknologi komunikasi, saat ini hampir tidak ada satupun kekuatan yang mampu mengendalikan atau melakukan sensor terhadap berita maupun hiburan termasuk berita atau tayangan yang termasuk dalam kategori pornografi.

Mungkin satu-satunya yang mampu mengendalikan dampak media tersebut adalah nilai yang ada di dalam diri remaja itu sendiri. Moral atau kemampuan untuk melakukan penilaian mana yang baik dan mana yang buruk harus ditanamkan sedini mungkin. Manakala remaja kemudian berhadapan dengan situasi sosial yang sangat kompleks maka ia masih mampu untuk menunjukkan jati dirinya.

Pornografi di media adalah materi seks di media massa yang secara sengaja di tujukan untuk membangkitkan hasrat seksual.

Contoh-contoh pornografi di media massa adalah gambar atau foto wanita dengan berpakaian minim atau tidak berpakaian di sampul depan atau di bagian dalam majalah atau media cetak, kisah-kisah yang menggambarkan hubungan seks di dalam berbagai media cetak, adegan seks di dalam film bioskop, Video atau Video Compact Disc (VCD), dan sebagainya.

Pendidikan seks, meskipun menyajikan tulisan dan gambar tentang seksualitas, tetapi tidak termasuk ke dalam pornografi, pendidikan seks bertujuan

²⁸Burhan Bung, *Pornomedia* (cet. 1 ; Jakarta : Prenada Media, 2005), h. 47.

memberi pemahaman yang benar mengenai seksualitas. Karena itu penyajiannya dilakukan tidak dengan cara yang membangkitkan birahi.

Di Indonesia, terjadi juga situasi yang paradoksial. Industri pornografi jelas dilarang secara hukum, tetapi penyebaran barang bajakan pornografi Indonesia masuk peringkat 10 besar dunia. Belum lagi terbitnya majalah playboy Indonesia yang jelas-jelas merupakan produk *franchise* dari playboy *enterprise* Amerika Serikat, industri pornografi raksasa. Dapat dikatakan bahwa pintu pornografi di Indonesia sudah terbuka, tinggal menunggu waktu untuk menjadikannya sebagai sebuah mesin industri.

Pornografi di era reformasi juga sempat merambah di dunia televisi dan komik. Di televisi, pornografi hadir melalui film-film yang ditayangkannya.²⁹

Tak hanya TV, dunia komik pun juga dijadikan ajang menyebar gambar-gambar atau cerita-cerita yang dapat merangsang syahwat. Salah satu komik porno yang banyak diminati adalah *Golden Boy*. Komik terbitan Elex Media Komputindo ini mengisahkan petualangan cinta Kintaro. Di semua edisi banyak sekali gambar dan kalimat erotis yang memperlihatkan adegan persetubuhan.³⁰

Fenomena lain pornografi di era reformasi munculnya revolusi goyang di dunia dangdut. Munculnya revolusi ini persis dengan munculnya pro-kontra RUU Anti Pornoaksi dan Pornografi, sehingga banyak yang mensiyalir RUU ini salah satu tujuannya adalah untuk mencekal revolusi goyang yang sudah kelewat batas, di samping sebagai solusi atas maraknya pornografi dalam berbagai bentuknya.

Objek pornografi yang menjadi landasan utama pembentukan tindak pidana pornografi disebutkan secara limitatif dan bersifat terbuka. Disebutkan macam-macam objek pornografi dalam Pasal 1 Angka 1 UUP. Akan tetapi hakim menentukan objek lain, khusus mengenai objek pesan melalui alat-alat komunikasi. Kiranya dengan cara merumuskan yang demikian itu, memberi

²⁹Badiatul Muchlisin Asti, *Gurita Pornografi Membelit Remaja* (cet ; 1, Grobongan : Oase Qalbu, 2010), h. 24.

³⁰*ibid*

kemungkinan ke depan memasukkan pesan melalui alat komunikasi baru yang sekarang belum di kenal.³¹

Tindak pidana pornografi dimuat dalam Pasal 29 s/d Pasal 38 UUP. Apabila dilihat dari sudut perbuatan yang dilarang, maka terdapat 33 tindak pidana pornografi yang dimuat dalam sepuluh pasal tersebut sebagai berikut:

- a. Tindak pidana pornografi memproduksi, membuat dan lainnya pornografi (Pasal 29 jo Pasal 4 ayat 1). Dalam tindak pidana ini terdapat 12 bentuk perbuatan yang dilarang terhadap objek pornografi.
- b. Tindak pidana menyediakan jasa pornografi (Pasal 30 jo Pasal 4 ayat 2).
- c. Tindak pidana meminjamkan atau mengunduh produk pornografi (Pasal 31 jo Pasal 5).
- d. Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan dan lainnya produk pornografi (Pasal 32 jo Pasal 6). Ada 6 perbuatan yang dilarang oleh Pasal 32 jo Pasal 6.
- e. Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan memproduksi, membuat dan lainnya pornografi (Pasal 34 jo Pasal 7).
- f. Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 34 jo Pasal 8).
- g. Tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 35 jo Pasal 9).
- h. Tindak pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum (Pasal 36 jo Pasal 10).
- i. Tindak pidana melibatkan anak dalam kegiatan dan/ atau sebagai objek dalam tindak pidana pornografi (Pasal 37 jo Pasal 11).
- j. Tindak pidana mengajak, membujuk dan lainnya anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (Pasal 38 jo Pasal 12). Dalam tindak pidana ini terdapat 7 perbuatan yang dilarang.

Teori mengenal dua cara perumusan delik formal dan delik materil. Pada delik formal yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/

³¹Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi selanjutnya disebut pornografi* (cet. I ; Surabaya : PMN,2009), h. 140-141.

keadaan lainnya) dengan mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut. Kedua, delik material selain merumuskan tindakan yang dilarang dilakukan, juga merumuskan kondisi akibat yang ditimbulkan karena tindakan terlarang tersebut. Jadi baru dapat dikatakan suatu perbuatan memenuhi unsur suatu pasal jika terpenuhi dua unsur tersebut, yakni perbuatannya dan akibat yang ditimbulkannya (*voltooid*).³² Melalui dua cara perumusan pasal tindak pidana tersebut, pada akhirnya memiliki konsekuensi dalam penegakan hukumnya.

C. Unsur-unsur tindak pidana pornografi

Undang-undang Pornografi (UUP) tidak secara tegas meniadakan tindak pidana pornografi dalam KUHP, memberlakukan KUHP. Sekedar diberikan syarat “ sepanjang tidak bertentangan dengan UUP “. Syarat yang demikian itu *obsuur*, tidak mudah penerapannya. Pada saat ini, dalam hukum pidana positif pornografi dikenal dua kelompok tindak pidana pornografi. Dalam hal dan keadaan tertentu dengan alasan hukum yang kuat tindak pidana pornografi dalam KUHP bisa diterapkan. Keadaan tersebut, yakni bila suatu kasus pornografi, satu-satunya yang dapat diterapkan ialah KUHP. Sementara itu UUP tidak. Keadaan itu sulit ditemukan, karena cakupannya UUP begitu luas. Juga perbuatan dan objek perbuatan tindak pidana pornografi dalam KUHP lebih konkret dari pada tindak pidana pornografi dalam UUP. Akan tetapi, tetap tidak tertutup kemungkinan pada keadaan tertentu hal itu terjadi.

Tindak pidana pornografi yang dimuat pada pasal 282 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) KUHP dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membuat tulisan atau gambar atau benda tersebut, memasukkannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana

³²E.Y Kanter dan SR Sianturi, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya* (cet; 1, Jakarta : Stora Grafika, 2003), h. 236-237.

penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-

- (2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin, memasukkan kedalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari dalam negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,-
- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencaharian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 75.000,-

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP melarang dilakukannya tiga jenis tindak pidana, masing-masing yakni :

- a. Menyebarluaskan, mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.
- b. Membuat, memasukkan, mengeluarkan atau mempunyai dalam persediaan suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan untuk disebarluaskan, dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka.
- c. Tanpa diminta menawarkan atau menyatakan sebagai dapat diperoleh suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan, baik itu dilakukan secara terbuka maupun dilakukan dengan cara menyebarluaskan suatu tulisan.³³

Di dalam rumusan ketiga tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP, unsur subjektif yang ia ketahui itu meliputi unsur-unsur suatu tulisan,

³³Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatuhan*, (cet ; 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 37.

suatu gambar atau suatu benda, tetapi tidak meliputi unsur yang sifatnya menyinggung kesusilaan atau sifatnya menyinggung rasa susila.

Itu berarti hakim atau penuntut umum harus dapat membuktikan tentang adanya pengetahuan pelaku bahwa yang ia sebarluaskan, yang ia pertunjukkan secara terbuka dan lain-lainnya ialah suatu tulisan, suatu gambar, atau suatu benda.

Jika di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku, pengetahuan pelaku tentang benda-benda tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim akan memberikan putusan bebas bagi pelaku.³⁴

Sifat melawan hukum kesusilaan dari “tulisan” atau “gambar” yang disiarkan atau disebarkan, terletak pada isi/ bunyi tulisan dan makna yang terkandung pada gambar. Sementara itu, sifat melawan hukum kesusilaan dari “benda” yang disebarkan melekat pada bendanya sendiri.

Sifat melanggar kesusilaan atas objek pornografi tersebut, selain harus ditujukan pada unsur kesengajaan (mengetahui), juga secara objektif sifat tulisan, gambar, dan atau benda tersebut benar-benar melanggar kesusilaan. Syarat itu juga berlaku pada dua bentuk kejahatan pornografi sengaja yang kedua dan ketiga lainnya. Harus ada persesuaian antara kenyataan bahwa tulisan, gambar, dan benda tersebut menurut nilai hukum dan keadilan masyarakat mengandung sifat melanggar kesusilaan (objektif) dengan sikap batin si pembuat (subjektif). Harus dapat dibuktikan keduanya yang objektif dan yang subjektif secara bersamaan.³⁵

Dalam perbuatan membuat mengandung syarat *causal verband* antara membuat sebagai penyebab dan adanya sesuatu (objek) sebagai akibat. Selesaiannya membuat dibuktikan dengan keberadaan tulisan, gambar atau benda *in casu* melanggar yang kesusilaan tersebut. Tindak pidana pornografi yang perbuatannya membuat merupakan tindak pidana formil-materiil atau semi formil atau semi materiil. Dirumuskan secara formil, namun untuk selesaiannya tergantung pada akibat peerbuatan. Akibat tersebut adalah adanya tulisan, gambar, dan benda yang melanggar kesusilaan.

³⁴ *ibid.*

³⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi selanjutnya disebut pornografi* (cet. I ; Surabaya : PMN,2009), h. 88.

Objek tindak pidana pornografi menurut Pasal 282 terbatas pada tiga macam yaitu tulisan, gambar, dan benda yang mengandung sifat melanggar kesusilaan. Sementara itu, objek tindak pidana pornografi menurut Pasal 283 lebih luas. Selain tulisan, gambar, dan benda, juga alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Meskipun terhadap dua objek pornografi yang disebutkan terakhir tidak secara tegas dicantumkan unsur sifat melanggar kesusilaannya, namun tidak berarti di dalam objek pornografi “alat mencegah dan menggugurkan kehamilan” tersebut tidak terdapat sifat melanggar kesusilaan terdapat secara terselubung di dalam kalimat “alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan”. Selain itu sifat melanggar kesusilaan pada kedua alat itu juga terletak pada dan bagi anak. Oleh karena itu, dua objek pornografi tersebut hanya berlaku untuk melindungi kepentingan hukum anak. Dengan maksud, kepentingan hukum mengenai pertumbuhan jiwa anak berlaku secara wajar, tanpa dipengaruhi oleh pengetahuan, dan apa yang dilihatnya.

Oleh karena tidak secara tegas dicantumkan dalam rumusan, maka sifat melanggar kesusilaan pada alat pencegah dan menggugurkan kehamilan tidak perlu dibuktikan secara khusus pada sidang pengadilan. Namun, tetap harus dibuktikan bahwa orang yang belum dewasa telah melihat atau menerima objek pornografi tersebut. Dengan demikian, dipastikan orang yang belum dewasa telah mengetahui alat mencegah atau menggugurkan kehamilan tersebut.³⁶

Dengan demikian, semua perbuatan dengan cara apapun terhadap dan yang berhubungan dengan benda pornografi menjadi terlarang dan terhadap pembuatnya patut disalahkan dan dijatuhi pidana. Sifat melawan hukum perbuatan pornografi yang diletakkan pada “dapat membangkitkan syahwat” seperti dalam KUHP dapat dilihat pada pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama (dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta) dalam perkara majalah Mayapada di tahun 1971.

Pengadilan tingkat pertama menafsirkan arti “sifat melanggar kesusilaan” dalam pasal 282 KUHP menyatakan bahwa segala sajian, baik yang berupa tulisan, gambar, benda maupun perbuatan yang melanggar perasaan kesusilaan atau

³⁶*ibid*

perasaan kesopanan yang dapat merangsang nafsu birahi atau menimbulkan pikiran yang tidak senonoh pada seorang normal yang hidup dalam masyarakat.³⁷



³⁷Tjipta Lesmana, *Pornografi dalam Media Massa* (cet. 1 ; Jakarta : Puspa Swara, 1994), h. 37

BAB III

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI

A. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pornografi

Masalah pornografi di Indonesia telah melampaui ambang toleransi dan merusak akhlak bangsa. Namun penyelesaiannya terhadap masalah pornografi belum sesuai dengan yang diharapkan. Kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda terhadap pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi, dan dahulu masyarakat lemah dalam merespon pornografi.

Faktor pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia melalui jaringan media komunikasi, baik cetak maupun elektronik, perlahan-lahan namun pasti telah mengikis iman bangsa Indonesia.³⁸

Keterbukaan masyarakat yang dipicu oleh reformasi di segala bidang, terutama reformasi politik sejak tahun 1998, membuat masyarakat semakin terbuka, semakin berani berbicara dan mengungkapkan semua persoalan hidup mereka. Termasuk semua “rahasia” pribadi mereka. Kadang keberanian ini “kebablasan” karena tidak seorang atau sebuah instansi bahkan lembaga masyarakat yang mampu mencegah keberanian yang kebablasan itu.

Jadi semua dapat diucapkan, di mana saja orang bisa mengucapkannya, serta tentang apa saja boleh diucapkan, boleh diceritakan. Termasuk hal-hal yang sangat sensitif dalam kehidupan moral, rumah tangga, dan pribadi seperti persoalan seksualitas ini.

Keberanian mengucapkan dan bercerita apa saja benar-benar terlepas dari konteks, waktu, dan ruang. Sehingga, kerusakan-kerusakan sosial yang diakibatkan oleh pengungkapan-pengungkapan dan tulisan-tulisan itu tidak pernah

³⁸ Neng Djubaedah., *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam* (cet. 3 ; Jakarta : Kencana Prenadana Media Group, 2009), h.137.

diukur dan dipandang sebagai sesuatu yang berbahagia untuk kehidupan bersama atau masa depan masyarakat dan generasi yang akan datang itu sendiri.

Sebaliknya masyarakat kita yang berkembang begitu cepat, disebabkan karena reformasi itu, bertabrakan dengan berbagai persoalan hidup mereka. Ketika reformasi berjalan, banyak pabrik yang tutup, PHK dimana-mana, banyak pegawai yang telah mapan sebagai pimpinan di sebuah perusahaan terpaksa harus kehilangan pekerjaan dan ia terpaksa harus menganggur. Kondisi ini mengantarkan masyarakat ke keadaan panik, endemik, kekacauan moral, depresi, dan sebagainya. Sehingga dengan berbagai upaya, orang-orang harus berusaha untuk mempertahankan hidup mereka. Kondisi di mana mereka berusaha mempertahankan hidup mereka di lingkungan sosial dan politik yang tidak menentu, maka kreativitas apa saja boleh diciptakan sebagai alat penghidupan mereka tanpa perlu susah memikirkan orang lain.

Di sisi lain, masyarakat yang frustrasi, susah, kehilangan pekerjaan, umumnya mencari sensasi, hiburan, pelarian, dan karya-karya pornomedia ini akan menjadi pelarian yang paling menyenangkan dan menjadi penyembuh seketika dan berbagai rasa frustrasi mereka itu.

Ada beberapa teori terkait hal ini. Salah satunya dikemukakan oleh Prof Bungin bahwa frustrasi ekonomilah yang menjadi sebab maraknya pornografi. Menurutnya, frustrasi ekonomi yang ditandai oleh banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan merajalelanya pengangguran itu, telah menciptakan kondisi di mana masyarakat begitu berlomba-lomba dalam mempertahankan hidup. Di dalam kondisi yang serba sulit itulah, menurut Bungin, akan muncul orang-orang yang menganggap bahwa kreativitas apa saja boleh diciptakan sebagai alat penghidupan, meskipun harus merugikan atau merusak moral orang banyak. Salah satu kreativitas yang seperti itu adalah membisniskan pornografi.³⁹

Di sisi lain, lanjut Pakar Sosiologi Komunikasi ini, masyarakat yang frustrasi, susah, kehilangan pekerjaan, pada umumnya akan mencari sensasi, pelarian, dan sebagainya, dan karya-karya pornografi yang dibisniskan itu akan

³⁹ Burhan Bungin, *Pornomedia* (cet. 1 ; Jakarta : Prenada Media, 2005), h. xvi-xvii

menjadi pelarian yang paling menyenangkan dan menjadi penyembuh seketika dari berbagai rasa frustrasi mereka itu.⁴⁰

Keterbatasan lapangan kerja yang dapat memicu seseorang melakukan tindak pidana pornografi seperti pembuatan dan pengedaran VCD porno yang hasilnya sangat menjanjikan dapat mengubah keadaan ekonomi seseorang. Di samping itu kecanggihan teknologi yang memudahkan seseorang untuk membuat video porno.

Dengan demikian, menurut teori di atas, menurunnya perekonomian merupakan penyebab utama dari munculnya para pengusaha dan penikmat pornografi. Sebab pornografi ini, dipandang oleh mereka sebagai komoditas yang menjanjikan keuntungan besar dan di samping itu juga dianggap sebagai hiburan yang dapat menjadi pelarian dari depresi hidup.

Yang menjadi penyebab dalam berkembangnya budaya pornografi adalah kapitalisme dan posmodernisme dekonstruksi. Dikatakan penyebab, sebab kapitalisme telah menjadi semacam ‘tanah subur’ bagi ‘tanaman’ pornografi dan semakin disehatkan tanaman tersebut oleh ‘pupuk’ berupa posmodernisme dekonstruktif.⁴¹

Faktor penyebab dari kelemahan masyarakat, antara lain disebabkan oleh faktor politik di bidang keagamaan yang terlihat dalam politik pendidikan agama di Sekolah-sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Umum dan Perguruan tinggi.

Disamping pihak-pihak tertentu yang memang bermoral buruk, banyak pula orang yang terlibat pornografi yang sesungguhnya juga hanya menjadi korbannya. Dengan imbalan yang tak seberapa besarnya dibandingkan dengan sebuah nama baik, keutuhan keluarga, dan ridha Allah, banyak orang rela menjadi pengedar VCD porno ataupun menjadi pekerja seks komersial (pelacur). Banyak dari mereka terpaksa melakukan ini karena desakan ekonomi. Karena itu tidak aneh berbagai razia dilakukan Aparat maupun beberapa kelompok yang menyatakan perang terhadap maksiat tidak mampu menghilangkan atau bahkan

⁴⁰*ibid.*

⁴¹ Yasraf Amir Piliang, *Posrealitas; Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika* (cet. 1 ; Yogyakarta dan Bandung : Jalasutra, 2009), h. 394.

sekedar mengurangi bisnis haram ini secara permanen, mungkin lain halnya bila desakan ekonomi bisa diatasi.

Orang akan cenderung pada satu jenis profesi yang terhormat, aman, menentramkan untuk menuju hari tua, karena itu melihat masalah masalah ekonomi yang sangat kompleks yang membelit negeri ini, tidak ada cara lain kecuali menerapkan system ekonomi yang lebih adil dan manusiawi. Sistem ini yang akan mengentaskan banyak orang dari bisnis yang menjerumuskan sehingga tidak ada lagi orang yang memasuki dunia pornografi karena alasan kesulitan ekonomi.

Maraknya pornografi di negeri ini, tidak lepas dari persoalan lain yang melingkupinya. Pornografi salah satunya yang terkait erat dengan masalah ekonomi. Dampak aspek ekonomi membuat tayangan porno ditinjau dari sisi usaha bidang persoalan jasa hiburan (entertainment) sangat menggiurkan. Biaya produksi bisa jauh lebih murah dibandingkan dengan tayangan yang bersifat mendidik, modal utamanya cukup dengan wajah cantik atau ganteng, body sexy dan pakaian mini.

Berdasarkan kenyataan ini, maka setiap individu yang bergerak di bidang jasa hiburan akan selalu berupaya meraih keuntungan sebaik-baiknya dengan menggali potensi yang mereka miliki secara maksimal. Salah satu caranya adalah mengeksploitasi potensi seksual pemainnya semaksimal mungkin. Mereka juga mungkin tahu dan menyadari bahwa berdasarkan pengalaman, kajian, bahkan riset pasar berkesimpulan, konsumen sangat merespon positif bila produk yang mereka jual berbumbu sesi penampilan keindahan tubuh yang aduhai dan percintaan. Orang lain biasa menyebutnya pornografi karena dunia hiburan adalah dunia usaha maka tentu produsen akan memproduksi barang atau jasa sesuai keinginan pasar agar usahanya untung.

Orang yang sudah dewasa jika melihat dan/ atau mendengar akan berbeda dengan orang yang masih anak-anak, atau orang yang belum dewasa, kemungkinan untuk dapat mengendalikan diri dari pornografi masih ada, dibandingkan dengan orang yang belum dewasa, terutama anak-anak yang berusia menjelang remaja, dan usia remaja, lebih mudah dipengaruhi oleh pornografi baik

yang dilihat atau yang didengar atau disentuh mereka. Lain halnya dengan anak-anak yang belum *baligh* dan belum *mumayyiz* tentu akan berbeda pula pengaruhnya.

Keterbatasan pengetahuan tentang agama juga dapat memicu seseorang melakukan tindak pidana baik berupa kekerasan seksual maupun pelecehan.

Ditinjau dari aspek pelakunya, mereka adalah para pekerja yang mencari sesuap nasi dan kehidupan yang layak. Mereka juga manusia biasa, sama seperti manusia Indonesia lainnya punya hak hidup, punya hak usaha, punya tanggung jawab, dan punya harapan di masa depan. Mereka juga punya keluarga yang perlu mereka hidupi. Kalupun belum berkeluarga mereka bekerja setidaknya untuk menghidupi diri sendiri. Mereka dituntut *survive* dalam persaingan hidup yang ekstras yang kadang tidak kenal belas kasihan. Dengan demikian, perlu kearifan dalam menyingkapinya. Kurang manusiawinya, jika vonis kesalahan dijatuhkan pada mereka. Bahkan tidak adil, kalau di satu sisi mereka di kritik bahkan mungkin dihujat, tetapi di sisi lain kita menikmati karyanya. Oleh karena itu, dalam menyingkapi pornografi tidak gegabah dengan nasib pelakunya.

Hal ini bukan untuk bermaksud membela para pelaku pornografi, tetapi hanya ingin mendudukan persoalan pada porsinya yang tepat. Tepat dalam artian ditinjau dari bebrbagai sudut pandang. Aspek psikologis, masa depan, pekerjaan dan sebagainya di samping aspek hukum tentunya. Hal ini penting untuk dipertimbangkan agar masyarakat yang masih peduli dengan norma-norma susila dan melakukan gerakan moral demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur, tidak terjebak oleh tindakan sendiri yang terkesan tidak konsisten dan tidak komprehensif dalam menyingkapi permasalahan.

Oleh karena itu bagi kaum muslimin yang urgen dan fundamental adalah bagaimana agar seluruh system kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara yang ada di bangun kembali diatas dasar yang lebih kokoh dasar itu adalah islam.

B. Dampak Yang Ditimbulkan Oleh Tindak Pidana Pornografi

Pornografi bukanlah fenomena yang baru di negeri ini. Sudah sejak lama, pornografi tumbuh subur dan menjadi bahan perdebatan yang tak pernah selesai.

Sejak Indonesia merdeka, bahkan sejak Indonesia masih dalam belenggu penjajahan (kolonialisme), pornografi sudah tumbuh menggeliat. Secara perlahan namun pasti, pornografi diam-diam menyeruak di tengah-tengah detak kehidupan masyarakat pornografi dinikmati, meski masih secara sembunyi-sembunyi.

Hingga ketika tabuh era reformasi berdentang nyaring pada pertengahan tahun 1998, tak lama setelah itu, pornografi seolah-olah menemukan momentumnya.

Akibat dari tindak pidana pornografi seperti yang ditayangkan oleh televisi-televisi maupun berita-berita melalui media cetak di Indonesia, adalah banyaknya kasus perkosaan, perzinaan, aborsi, bahkan pembunuhan. Perkosaan-perkosaan akibat tindak pidana pornografi telah banyak dilakukan, meskipun pornografi bukan satu-satunya penyebab terjadinya perkosaan. . Seperti pada kasus seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran di Jakarta diperkosa dan dibunuh oleh pembantunya, laki-laki, setelah pembantu laki-laki tersebut membaca dan melihat tulisan dan gambar-gambar porno.⁴²

Perkosaan akibat tindak pidana pornografi tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban. Bahkan ada beberapa kasus perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak perempuan kandung (baik balita, anak-anak, maupun dewasa), anak laki-laki kandung berusaha memerkosa ibu kandung sebelum ia memerkosa saudara perempuan kandungnya, kakek memerkosa cucu perempuannya yang masih balita ataupun anak-anak, paman memerkosa keponakan perempuan yang masih balita, anak-anak, amupun remaja, saudara laki-laki memerkosa saudara sepupu perempuan.

Pornografi sangat memberikan pengaruh buruk dalam kehidupan masyarakat baik pada orang dewasa maupun pada anak-anak yang dapat merusak moral generasi bangsa. Tontonan yang tidak layak ditayangkan masih saja menjadi konsumsi publik yang sangat dicari-cari, hal ini disebabkan karena pornografi dapat membuat seseorang kecanduan dan menumbuhkan rasa penasaran yang sangat besar.

⁴²Adrina Talsim, *Bila Perkosaan Terjadi* (cet. 4 ; Jakarta : Kalyanamitra, 2002), h.36-37.

Karena pornografi terkait dengan bisnis, maka dampaknya bagi masyarakat sangat luas, baik psikologis, sosial, etis maupun teologis. Secara psikologis, pornografi membawa beberapa dampak. Antara lain, timbulnya sikap dan perilaku antisosial. Selain itu kaum pria menjadi lebih agresif terhadap kaum perempuan. Yang lebih parah lagi bahwa manusia pada umumnya menjadi kurang responsif terhadap penderitaan, kekerasan dan tindakan-tindakan perkosaan. Akhirnya, pornografi akan menimbulkan kecenderungan yang lebih tinggi pada penggunaan kekerasan sebagai bagian dari seks. Dampak psikologis ini bisa menghinggapi semua orang, dan dapat pula berjangkit menjadi penyakit psikologis yang parah dan menjadi ancaman yang membawa bencana bagi kemanusiaan.

Dilihat dampak sosialnya, dapat disebutkan beberapa contoh, misalnya meningkatnya tindak kriminal di bidang seksual, baik kuantitas maupun jenisnya. Misalnya sekarang kekerasan sodomi mulai menonjol dalam masyarakat, atau semakin meningkatnya kekerasan seksual dalam rumah tangga. Contoh lain ialah eksploitasi seksual untuk kepentingan ekonomi yang semakin marak dan cenderung dianggap sebagai bisnis yang paling menguntungkan. Selain itu, pornografi akan mengakibatkan semakin maraknya patologi sosial seperti misalnya penyakit kelamin dan HIV/AIDS yang sangat ditakuti remaja sejak tahun 1986. Penyakit ini disebabkan oleh virus-virus tertentu yang dikenal dengan nama HIV (*Human Immuno deficiency virus*) yang jika menyerang manusia menyebabkan daya tahan tubuh terhadap serangan kuman penyakit menjadi hilang dan akibatnya penderita perlahan-lahan akan meninggal karena badannya makin lama makin melemah.⁴³

WHO (*World Health Organosation*) memperkirakan, sampai akhir tahun 1996, orang yang terinfeksi HIV mencapai 30 juta orang dan mereka yang meninggal akibat AIDS sebanyak 6,4 juta orang. WHO juga melaporkan, penderita AIDS paling banyak ditemukan di Amerika Serikat, yaitu 581.429

⁴³Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja* (cet.1 ; Jakarta : PT. Raja grafindo persada, 2003), h. 181.

orang, disusul Brasil 103.262 orang, Tanzania 82.174 orang, Thailand 59.782 orang, dan Prancis 45.395 orang.⁴⁴

Dapat ditambahkan bahwa secara umum pornografi akan merusak masa depan generasi muda sehingga mereka tidak lagi menghargai hakikat seksual, perkawinan dan rumah tangga.

Dari segi etika atau moral, pornografi akan merusak tatanan norma-norma dalam masyarakat, merusak keserasian hidup dan keluarga dan masyarakat pada umumnya dan merusak nilai-nilai luhur dalam kehidupan manusia seperti nilai kasih, kesetiaan, cinta, keadilan, dan kejujuran. Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan masyarakat sehingga tercipta dan terjamin hubungan yang sehat dalam masyarakat. Masyarakat yang sakit dalam nilai-nilai dan norma-norma, akan mengalami kemerosotan kultural dan akhirnya akan runtuh.

Selain itu, secara rohani dan teologis dapat dikatakan bahwa pornografi akan merusak harkat dan martabat manusia sebagai citra sang Pencipta/Khalik yang telah menciptakan manusia dengan keluhuran seksualitas sebagai alat Pencipta untuk meneruskan generasi manusia dari waktu ke waktu dengan sehat dan terhormat.

pornografi membawa dampak sangat buruk bagi kehidupan manusia. Maka tidak bisa lain, harus ada usaha bersama seluruh masyarakat melawan pornografi supaya tidak semakin jauh menjerumuskan kita kepada pengingkaran akan hakikat kita sebagai manusia yang dikaruniai segala sesuatu oleh sang Pencipta, termasuk seksualitas untuk tugas dan tujuan mulia, yaitu menciptakan generasi manusia secara berkelanjutan dengan keadaan sehat jasmani dan rohani, jiwa dan raga.

Akibat dari pornografi pernah terjadi pemerkosaan dan pembunuhan terhadap orang lain yang dilakukan seorang laki-laki terhadap temannya, mahasiswa IPB Bogor (1994) sepulang mereka menonton film porno. Pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan orang lain (bukan keluarga sedarah, atau semenda) juga dilakukan oleh seorang pembantu laki-laki yang masih muda terhadap putrid majikannya, seorang mahasiswa kedokteran gigi di

⁴⁴Solihin, *Jangan Jadi Bebek* (cet. 1 ; Jakarta : Gema Insani, 2002), h. 129.

Jakarta setelah pembantu tersebut membaca dan melihat gambar pornografi, dan banyak kasus-kasus serupa lainnya yang dimuat dalam media cetak maupun ditayangkan dalam televisi-televisi.⁴⁵

Pornografi pastilah merusak kehidupan umat manusia pada umumnya, kini dan di masa yang akan datang. Maka sangat diperlukan adanya usaha bersama melawan pornografi secara efisien. Yang pertama-tama, adalah pendidikan seks dalam keluarga dan institusi agama. Bagaimanapun pornografi tidak akan mungkin lagi terbendung. Maka pertahanan yang seharusnya diperkuat, yaitu pendidikan terhadap generasi muda dan orang dewasa supaya pengaruh kuat pornografi tidak menjerumuskan.

Kedua, pemerintah memang harus menertibkan media dan pelaku pornografi melalui konstitusi dan kesadaran produsen. Kiranya media perlu mawas diri supaya tidak mendukung arus pornografi. Usaha lain yang penting adalah pemblokiran cyber-porno melalui kebijakan konstitusi negara, atau usaha pribadi, khususnya keluarga. Cyber-porno merupakan tekanan pornografi yang paling kuat dan paling mudah bagi mereka yang punya saluran internet. Tetapi yang paling penting adalah pengendalian diri konsumen terhadap informasi yang terkait dengan pornografi. Tanpa pengendalian diri ini, upaya konstitusi apapun rasanya tak akan bermanfaat.

Akhirnya dibutuhkan kerja sama semua pihak untuk menyiasati pornografi. Mungkin kita tidak harus menjadi munafik dengan kondisi masyarakat modern yang memang sangat terbuka. Kita tidak bisa menutup-nutupi kenyataan kuatnya pengaruh pornografi dalam masyarakat kita. Pastilah bukan usaha-usah penghancuran yang menjadi jalan terbaik menyiasati pengaruh pornografi. Yang terutama adalah kesadaran bahwa membiarkan pornografi merusak fisik, jiwa dan rohani kehidupan kita karena mengeksploitasi seksualitas yang seharusnya kita hargai dan muliakan sebagai anugerah yang sangat penting dari sang Pencipta.

⁴⁵Sita Aripurnami, *Pornografi Dalam Perspektif Perempuan* (cet.1 ; Jakarta : I IND-HILL, 1997), h. 146-147

C. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi

Keberadaan aturan baik yang bersifat formal maupun non formal yang berlaku di masyarakat, merupakan suatu kebutuhan yang cukup mendasar . karena adanya aturan yang melindungi kepentingan-kepentingan individu maupun kelompok dari berbagai gangguan akibat kejahatan yang dapat merugikan individu maupun kelompok tersebut. Suatu kenyataan bahwa di dalam pergaulan hidup manusia, individu, maupun kelompok. Sering terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma perilaku terutama norma hukum. Dalam pergaulan penyimpangan norma ini di sebut dengan kejahatan.⁴⁶ Sebagai perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan dalam kehidupan manusia, kejahatan adalah masalah sosial, yaitu masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat, si pelaku dan korban adalah anggota masyarakat juga.⁴⁷

Salah satu kejahatan yang sering terjadi bahkan merupakan fenomena umum adalah kejahatan asusila dan pelecehan seksual. Kejahatan kesusilaan (*moral offenses*) dan kekerasan seksual (*sexual harassment*) merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional tetapi juga merupakan masalah hukum semua Negara di dunia atau merupakan masalah global.⁴⁸

Hukum pidana pada dasarnya berisi norma hukum tentang larangan dan keharusan, disertasi dengan ancaman pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, delik dan peristiwa pidana dan terhadap pelanggaran bisa diberikan sanksi pidana berupa pidana yang disediakan oleh Undang-undang.

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya perlindungan masyarakat. Oleh karena itu dapat

⁴⁶Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana selanjutnya disebut dengan acara pidana* (cet. 1 ; Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), h.51.

⁴⁷*ibid.*

⁴⁸Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (cet. 1 ; Bandung : Eresco, 1988)h. 103.

dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.⁴⁹

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana yang sama di masa yang akan datang, serta untuk menegakkan norma hukum. Namun demikian, dilaksanakannya pemidanaan harus tetap menghindari ketidakadilan (*injustice*) dengan menetapkan batas pemidanaan (*the limit of sentencing*) dan bobot pemidanaan (*the level of sentencing*).

Ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi diatur dalam Undang-undang pornografi maupun dalam KUHP. Ada dua jenis Sanksi bagi pelaku tindak pidana pornografi yaitu pidana penjara dan pidana denda. Untuk tindak pidana pornografi, pidana penjara paling rendah adalah 6 (enam) bulan dan paling tinggi adalah 12 (dua belas) tahun. Sedangkan untuk pidana denda ancaman paling rendahnya adalah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi adalah Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah). Jadi hanya ada dua alternatif tindak pidana dalam untuk tindak pidana ini.

Khusus untuk tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai obyeknya, UUP memberikan ancaman pidana berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, sedangkan untuk pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Oleh karenanya, besaran pidana denda sebaiknya disamakan dengan pidana ganti kerugian, yakni akan dihitung berdasarkan dampak kejahatan yang dialami korbannya atau masyarakat. Semakin besar nilai kerugian materiil akan semakin besar pidana denda yang hendak dijatuhkan kepada pelanggar. Apabila ditetapkan sebelumnya seperti ketentuan Pasal 4 ayat (1) pidana yang hendak dijatuhkan bisa sama padahal perbuatan pidana yang sama belum tentu menimbulkan dampak kerugian yang sama, umumnya berbeda-beda, maka pidana denda juga berbeda-beda sesuai nilai kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana.

⁴⁹D. Soejono, *Sosio Kriminologi* (cet.1 ; Bandung : Alumni, 1976)h. 158.

Pidana denda sebagai instrumen pemidanaan untuk mencapai tujuan pemidanaan dinilai lebih tepat, asalkan disesuaikan dengan kemampuan terpidana, baik dilakukan secara tunai maupun dengan cara mengangsur. Pidana denda memang berbeda dengan pidana ganti kerugian yang dapat dibayarkan langsung kepada korban, dalam konteks ini pidana denda dibayarkan kepada negara dan negara membayar kepada korban (pihak yang dirugikan) sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Jika kerugian akibat kejahatan bersifat abstrak atau kolektif (masyarakat), maka pidana dapat dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan layanan umum kepada masyarakat terutama terhadap kelompok masyarakat yang menderita akibat adanya kejahatan.

Perangkat hukum terdapat juga dalam KUHP pasal 282, berbunyi :

“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahuilainnya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”. Meski tidak secara eksplisit mendefinisikan pornografi, namun rujukan hukum inilah yang dipakai hakim dan aparat hukum lainnya di Indonesia sejak tahun 50-an hingga saat ini dalam memutuskan perkara pornografi”.⁵⁰

Namun demikian, permasalahan pornografi tidak cukup diatasi dengan berkonsentrasi pada ancaman pidana yang akan diterapkan. Penanganan permasalahan tersebut merupakan salah satu pilar penting dalam memerangi tindak pidana pornografi. Penanganan yang komprehensif, mulai dari penguatan pendidikan dan pengetahuan dalam diri individu dan masyarakat, penegakkan hukum, dan reformasi aparat penegak hukum merupakan kunci keberhasilan dalam memerangi dan menangani permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan.

⁵⁰Andi Hamsah, *Pornografi Dalam hukum Pidana selanjutnya disebut dengan hukum Pidana* (cet. 1 ; Jakarta : Bina Mulia, 1987), h 56.

BAB VI

TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Tindak Pidana Pornografi Menurut Hukum Islam

Islam adalah agama yang ajarannya *kaffah* (lengkap/ komprehensif), menyangkut seluruh aspek kehidupan. Termasuk cara berpakaian, Islam juga memberi pandangan secara luas.

Salah satu cara berpakaian yang dicanangkan Islam adalah menutup aurat. Inilah fungsi pertama dan utama dalam berpakaian. Karena Islam memerintahkan umatnya untuk menutup auratnya dan tidak menampakkan auratnya.

Aktivitas seksual dalam islam, selain harus dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang telah terikat dalam tali pernikahan, juga bersifat privasi. Dengan demikian, aktivitas seperti ini bukanlah untuk konsumsi umum. Selain aktivitas seksual harus dilakukan di tempat yang sepi dan tertutup, islam juga memberi larangan yang tegas agar suami istri tidak menceritakan aktivitas seksualnya kepada orang lain.

Menurut Jalaluddin Rahmat, manusia sebagai sifat-sifat kebinatangan. Nafsu adalah sumber energi yang menggerakkan tubuhnya untuk memelihara kemanusiaannya, Allah menciptakan berbagai penjagaan. Salah satu diantara penjagaan itu adalah akal. Dengan akalnya, manusia dapat tidak secara membuta mengikuti hawa nafsunya. Bahkan dengan akalnya, ia dapat mengendalikan nafsu untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Malu adalah penjagaan lain yang diberikan oleh Allah. Bila binatang dapat melakukan apa saja dalam situasi apa saja, maka manusia yang normal harus memperhitungkan situasi untuk melakukan suatu kegiatan. Manusia juga bukan hanya digerakkan oleh nafsu ia juga bertindak atas dasar rasa malu.⁵¹

⁵¹Jalaluddin Rahmat, *Islam Aktual, Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim* (cet 1 ; Bandung : Mizan, 1999) h. 261-262

Akal dan malu adalah dua contoh penjagaan manusia, supaya ia tidak celaka atau jatuh menjadi binatang. Semua dosa meruntuhkan penjagaan, jika masyarakat memandang dosa sebagai hal yang wajar, maka perlahan-lahan masyarakat itu akan berubah menjadi “masyarakat binatang”.⁵²

Merebaknya pornografi merupakan cerminan dari masyarakat yang mulai tercerabut urat saraf malunya. Sehingga mengumbar aurat sebagai hal yang biasa, bahkan menjadi komoditas bisnis yang diminati.

Dengan demikian, menonton adegan seksual tersebut (walaupun dalam bentuk VCD) tentulah terlarang secara syar’i dan haram hukumnya. Di sisi lain, hampir semua VCD porno yang beredar, pemain yang memperagakan aktifitas seksual itu bukanlah pasangan suami istri, sehingga dapat dikatakan pemain dalam VCD porno itu telah melakukan adegan zina yang dalam Islam terlarang secara syar’i dan memiliki sanksi hukum yang sangat keras. Dengan demikian, menyaksikan adegan berarti sama saja artinya dengan memberi legalitas terhadap aktivitas zina. Dan tentu hal itu berimplikasi dosa.

Sehingga sangat wajar bila mayoritas ulama melarang menonton film porno. Sebab, menurut kesepakatan ulama, perbuatan tersebut dapat membangkitkan hawa nafsu, melanggar kesopanan dan nilai-nilai islam, menyetujui kerendahan dan kehinaan, membawa keburukan dan kejahatan, serta berdampak pada dekadensi moral bagi suatu bangsa. Mengharamkannya merupakan upaya untuk menutup pintu kejahatan. Dalam QS. Al-Isra’ (17) : 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahannya :

dan janganlah kamu mendekati zina Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.⁵³

Salah satu prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam adalah bahwa jika ia mengharamkan sesuatu, maka ia mengharamkan pula berbagai sarana yang

⁵² *ibid*

⁵³ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan* (cet. 1 ; jakarta :Asy-Syifa, 1990), h. 227.

mengantarkan kepadanya dan menutup rapat berbagai pintu yang menuju ke arahnya.

Dari itu, para ahli ushul fiqih menetapkan kaidah sesuatu yang mengantar kepada yang haram adalah haram.⁵⁴ Sebagaimana diketahui, Islam sangat melarang keras perilaku perzinaan (seks di luar nikah). Perzinaan di sebut sebagai *faahisah* (perbuatan keji) dan *sya'a sabiila* (jalan yang sangat buruk). Karena, jika Islam mengharamkan perzinaan, maka tentu ia mengharamkan segala pengantar dan perangsangnya. Dalam bahasa alquran, segala yang dapat , mendekatkan perzinaan (*taqrabuzzina*) maka hal itu adalah alrangan keras untuk dilakukan.

Tak bisa dipungkiri, pornografi adalah sesuatu yang dapat mendekatkan seseorang pada perzinaan. Bisa menjadi perangsang birahi yang sangat nyata. Beberapa survey yang dilakukan dewasa ini sangat jelas, bahwa pornografi memang merupakan perangsang birahi yang sangat nyata.

Dengan demikian, pornografi dalam segala bentuknya, adalah sesuatu yang terlarang (haram) dalam Islam. Keharaman pornografi ini sama kedudukannya dengan pengharaman terhadap perilaku-perilaku yang dapat menjadi pengantar dan perangsang kearah perzinaan lainnya seperti, *tabarruj* (memperlihatkan aurat dengan sengaja, menyingkap wajahnya dan menampilkan kecantikan, pakaian, perhiasan dan ucapan)⁵⁵, berduaan dengan lawan jenis (*khalwat*), lagu-lagu jorok dan lain sebagainya.

Dari aspek-aspek yang dikemukakan di atas, menjadi jelaslah bahwa Islam memandang pornografi sebagai sebuah kejahatan moral dan kemaksiatan. Hukum pornografi adalah haram dengan sangat jelas.

Dengan memakai kaca mata Islam, tidak aka nada debat dan kontroversi mengenai pornografi. Di sengaja atau tidak, dapat merangsang atau tidak, bila aurat telah dipertontonkan (apalagi sangat vulgar) seperti dalam dalam gambar-

⁵⁴Yusuf Qaradhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam* (cet. 1 ; Solo : Era Intermedia, 2000), h. 28

⁵⁵Ma'ruf Ma'sum, *Karakter Zhohir Wanita Sholihah* (cet. 1 ; Rembang : Ma'sum Press, 1995). h. 37

gambar yang dipajang di tabloid-tabloid, maka keharaman itu masuk dalam kategori *tabarruj* yang dikecam keras dalam Islam.

Setiap musibah, bencana, nasib sial dan kekurangan, baik di dunia maupun di akhirat, penyebabnya adalah dosa dan tidak melaksanakan perintah Allah. Kemaksiatan adalah api yang membakar nikmat keseluruhan, seperti halnya api yang membakar kayu bakar”.⁵⁶

Islam tidak mengenal seni yang justru merendahkan harkat dan martabat manusia. Seni dalam Islam bukan seni yang malah menjerumuskan orang kepada belenggu nafsu dan rantai birahi yang terkutuk. Tetapi, seni dalam Islam adalah seni yang “mencerahkan”, seni yang membangkitkan *ghirah*, menjernihkan hati, menyehatkan akal pikiran, dan membantu seseorang kembali kepada fitrah dirinya yang suci, yaitu fitrah diri yang senantiasa merindukan kebenaran dan kedamaian yang hakiki yang diridhai Allah Swt.

Sebagai konsekuensi dari keharaman pornografi dalam berbagai bentuknya, maka sesuai dengan prinsip Islam, bahwa dosa sesuatu yang haram tidak hanya pada pelakunya saja, akan tetapi cakupannya meluas, meliputi semua pihak yang terlibat, baik secara moral maupun material. Semua menanggung dosa sesuai dengan kadar keterlibatannya. Maka, dengan demikian, pelaku pornografi, pembuat, agen, pengedar, penjual, pembeli, dan semua yang terlibat dalam lingkaran kemaksiatan pornografi ini akan menanggung dosa sesuai kadar keterlibatannya.

B. Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pornografi

Pornografi kini sudah menjadi sesuatu yang tidak ditabukan lagi. Padahal, ia sudah jelas-jelas mengakibatkan banyak kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Fenomena seks bebas adalah salah satu buktinya. Pornografi memang memberikan dampak bagi merajalelanya seks bebas di negeri ini. Dalam hasil penelitiannya ia menyatakan, “Pornografi mempunyai dampak terhadap perilaku bebas yang dilakukan remaja. Perilaku seksual yang dilakukan remaja berawal dari rasa terangsang akibat melihat gambar atau adegan pornografi.

⁵⁶Shaleh Tamimi, *Onani Masalah Anak Muda* (cet. 1 ; Jakarta : Gema Insani, 2003), h. 23

Menyadari merebaknya pornografi, sulit menemukan pangkal permasalahannya. Banyak faktor yang memicu sekaligus melancarkan “bisnis syahwat” ini. Faktor mentalitas masyarakat merupakan penyebab utamanya. Artinya, merebaknya pornografi merupakan cerminan keadaan moral masyarakat.

Bila masyarakat menolak pornografi, pornografi tidak akan merebak. Pornografi merebak karena memang selama ini banyak masyarakat yang menerima, bahkan menikmatinya.

Dengan demikian, pornografi menjadi lingkaran setan yang dilematis, pornografi dicaci, dibenci, dan diperangi oleh sebagian masyarakat, tapi juga dinikmati dan dirindui oleh sebagian masyarakat yang lain.

Merebaknya pornografi adalah merebaknya kemaksiatan dan kemungkaran. Bila dibiarkan pornografi akan merusak moralitas masyarakat, terutama generasi muda. Maka, solusi alternatif yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin adalah dengan terus menerus tanpa kenal lelah selalu menggiatkan gerakan dakwah dan *amar makruf nahi munkar* untuk memerangi pornografi.

Dalam konteks pornografi, gerakan dakwah dan *amar ma'ruf nahi munkar* bisa dikemas dalam bentuk “Gerakan Kampanye Anti pornografi”. Tujuannya adalah membangun kesadaran kolektif masyarakat secara luas akan bahaya pornografi dalam menghancurkan moralitas anak bangsa. Gerakan kampanye ini bisa dimulai dari masing-masing individu yang memiliki fikrah dakwah, diteruskan kepada keluarga dan masyarakat.

Pornografi memberikan dampak yang sangat buruk dalam kehidupan masyarakat baik secara psikologi, sosial, etis, maupun teologis yang juga dapat meningkatkan tindak kriminal di bidang seksual. Pornografi juga merusak norma-norma dalam masyarakat, merusak keserasian hidup masyarakat. , harus ada usaha bersama seluruh masyarakat melawan pornografi supaya tidak semakin jauh menjerumuskan kita kepada pengingkaran akan hakikat kita sebagai manusia yang dikaruniai segala sesuatu oleh sang Pencipta, termasuk seksualitas untuk tugas dan tujuan mulia, yaitu menciptakan generasi manusia secara berkelanjutan dengan keadaan sehat jasmani dan rohani, jiwa dan raga.

Pornografi pastilah merusak kehidupan umat manusia pada umumnya, kini dan di masa yang akan datang. Maka sangat diperlukan adanya usaha bersama melawan pornografi secara efisien. Pornografi dapat ditanggulangi dengan cara :

- a. Memberikan pendidikan seks dalam keluarga dan institusi agama. pornografi tidak akan mungkin lagi terbendung, Maka pertahanan yang seharusnya diperkuat, yaitu pendidikan terhadap generasi muda dan orang dewasa supaya pengaruh kuat pornografi tidak menjerumuskan.
- b. Pemerintah harus menertibkan media dan pelaku pornografi melalui konstitusi dan kesadaran produsen. Kiranya media perlu mawas diri supaya tidak mendukung arus pornografi. Usaha lain yang penting adalah pemblokiran cyber-porno melalui kebijakan konstitusi negara, atau usaha pribadi, khususnya keluarga. Cyber-porno merupakan tekanan pornografi yang paling kuat dan paling mudah bagi mereka yang punya saluran internet. Tetapi yang paling penting adalah pengendalian diri konsumen terhadap informasi yang terkait dengan pornografi. Tanpa pengendalian diri ini, upaya konstitusi apapun tidak akan bermanfaat.

Islam merupakan salah satu solusi dalam mengatasi pornografi, dikatakan demikian karena Pornografi yang memiliki berbagai eksese negatif itu tentu tidak akan muncul apalagi berkembang biak apabila sebab-sebabnya ditiadakan. Teori pertama yang menyatakan bahwa frustrasi ekonomi yang menjadi sebab maraknya pornografi, ternyata hanya hidup di dalam sistem ekonomi selain Islam. Apabila sistem ekonomi Islam betul-betul diterapkan, maka mustahil dapat terjadi frustrasi ekonomi.

Dalam kata lain, dengan sistem ekonomi yang berlandaskan akidah Islam itu, masyarakat tidak akan sampai mengalami frustrasi akibat ambruknya perekonomian. Sebab dengan segala fitur yang ada, sistem ekonomi Islam akan mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera atau minimal hidup berkecukupan. Yang jelas, sistem ekonomi Islam tidak akan sampai membiarkan jutaan orang hidup sengsara, bahkan akan berusaha agar tidak ada satu pun rakyat

yang kelaparan yang praktiknya dapat kita lihat dalam sejarah pemerintahan dua Khalifah Umar, Umar bin Khaththab dan Umar bin Abdul Aziz.

Lewat mekanismenya yang khas, sistem ekonomi Islam akan mampu mewujudkan rakyat yang lebih sejahtera dan makmur, jauh melebihi dari yang bisa diwujudkan oleh sistem-sistem ekonomi lainnya.⁵⁷

Dengan kemakmuran dan kesejahteraan yang berhasil diwujudkan oleh sistem ekonomi Islam, tentu tidak terjadi frustrasi ekonomi sehingga masyarakat pun tidak akan sampai hati membisniskan pornografi dengan alasan mempertahankan hidup. Namun meski begitu, masih tetap ada potensi orang-orang akan membisniskan pornografi, bila hanya sistem ekonomi Islam saja yang diterapkan. Walhasil, sistem hukum Islam pun harus juga diterapkan, sebab sistem hukum Islam tidak akan menolerir munculnya bisnis-bisnis di bidang keharaman dan akan memberikan sanksi yang berat bagi siapapun yang melanggar ketentuan tersebut.

Suasana yang penuh ketakwaan juga akan meniadakan munculnya penawaran dan permintaan di kalangan masyarakat terhadap pornografi. Dan ini, akan berhasil apabila sistem ekonomi dan hukum Islam berhasil diwujudkan dalam masyarakat. Karena kedua sistem tersebut hanya bisa hidup dalam institusi negara Islam (Khilafah), maka secara tidak langsung Khilafah pun harus diwujudkan agar kedua sistem tersebut dapat diterapkan.

Islam memiliki seperangkat sistem dan norma yang mampu membentengi individu dan masyarakat. Dalam pandangan Islam, pornografi adalah sebuah tindak kemaksiatan yang haram dilakukan.

Secara individu, Islam memiliki konsep tentang aurat yang jelas dan baku. Aurat laki-laki, baik terhadap sesama laki-laki maupun terhadap wanita adalah antara pusar dan lutut. Sementara aurat wanita terhadap laki-laki asing (bukan suami dan mahramnya) adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Di samping itu, pakaian yang dikenakannya sudah ditentukan yakni jilbab dan kerudung adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan

⁵⁷ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (cet. 3 ; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 234.

telapak tangan. Aurat tersebut wajib ditutup dan tidak boleh dilihat kecuali orang yang berhak, terlepas terlihatnya aurat itu dapat membangkitkan birahi atau tidak.

Pola hubungan pria dan wanita diatur sedemikian rupa sehingga mereka akan tercegah dari segala tindakan yang menjurus kepada tindakan pornoaksi dan memproduksi materi pornografi. Namun bukan berarti melarang adanya hubungan pria dan wanita di ranah publik.

Dalam kaitan ini negara mengawasi secara ketat seluruh media yang ada. Langkah ini tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, tapi ini sebagai upaya membentengi umat dari tindak kemungkaran yang bisa mendatangkan murka Allah SWT. Bila pornografi itu haram, maka jalan yang menuju ke kedua hal itu pun haram. Di sinilah negara memiliki peran vital.

Melalui konsep Islam, individu, keluarga, masyarakat, dan negara diarahkan untuk takwa. Individu menjaga dirinya dari perbuatan dosa, keluarga dan masyarakat mengontrol dan menjaga anggotanya dari maksiat, dan negara melindungi warganya dari murka Allah dengan menerapkan aturan-Nya secara ketat.

Konsep ketakwaan komprehensif inilah yang tak dimiliki oleh sistem di luar Islam. Maka dari itu, konsep ini hanya bisa diterapkan dalam sistem yang Islami yakni di negara khilafah. Hanya di negara khilafahlah, Islam secara kaffah bisa dilaksanakan.

Jadi, solusi tuntas pemberantasan pornografi dan pornoaksi sangat tergantung pada penghilangan akar masalahnya. Sudah sangat jelas, akar permasalahan maraknya pornografi dan pornoaksi adalah sistem sekuler-liberal itu sendiri. Makanya, kalau masalah ini mau tuntas, sistemnya harus diganti. Tegakkan syariah dan khilafah.

C. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Dalam Islam

Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarimah / jinayat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah SWT. Yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukannya. Larangan hukuman berarti melakukan

perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tak melakukan (*omission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah kejahatan.⁵⁸

Defenisi kejahatan diatas mengandung arti bahwa tidak ada suatu perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif dihitung sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran, kecuali hukuman yang khusus untuk perbuatan atau tidak berbuat itu telah ditentukan dalam syariat.

Dalam konteks hukum Islam mengenai masalah pornografi ini, yang dijadikan patokan dan definisi tentu bukan seperti yang didefinisikan dalam UU Pornografi di atas. Sebab, kalau definisinya seperti di atas, pasti tidak akan didapatkan ketentuan yang pasti untuk menyikapi masalah ini. Berkait dengan masalah pornografi ini, Islam tidak menyoroti soal apakah itu dianggap cabul atau tidak. Yang disoroti dan ditetapkan dalam ketentuan hukum Islam adalah sumber dari masalah kecabulan itu sendiri, yaitu anggota tubuh, baik laki-laki maupun perempuan. Fikih Islam menyebutnya sebagai “aurat”. Inilah yang dipermasalahkan dalam Islam, bukan pokok kecabulannya atau tidak.

Pornografi dalam ajaran agama Islam, merupakan suatu bentuk pelanggaran yang menyalahi nilai dan norma yang telah diatur didalamnya. Islam lebih mengenal hal itu dengan istilah aurat. Yang mana aurat tersebut seharusnya tertutup dari pandangan siapapun yang melihatnya, tetapi pada kenyataannya menjadi hal yang biasa untuk diperlihatkan. Ajaran agama Islam menjelaskan bahwasannya memperlihatkan aurat adalah suatu perbuatan yang mengarah pada terjadinya zina. Dan zina itu secara tegas dilarang dalam Islam.

Islam menganggap pornografi adalah suatu perbuatan zina. Sehingga Allah SWT menetapkan hukuman yang sangat berat. Seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nur (24) : 2

⁵⁸Topo Santoso, *Membumikan hukum Islam : Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda* (cet. 1 ; Jakarta : Gema Insani Press, 2003) h. 57.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمُ

بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ

عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Terjemahannya :

perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Oleh sebab itu, dalam menetapkan hukum mengenai melihat gambar dan film porno ini, batasan yang akan digunakan adalah batasan yang ditetapkan dalam fikih Islam mengenai aurat laki-laki dan perempuan. Mengenai batas-batas aurat, laki-laki dan perempuan, itu sendiri memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Namun, secara umum pendapat yang dipegang oleh mayoritas (jumhûr) ulama menyatakan bahwa batas aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut; sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.

Pornografi itu jelas haramnya. Pornografi haram karena itu merupakan aktivitas mengumbar aurat bahkan perzinaan. Adapun salah satu dalil haramnya pornografi adalah karena merupakan sarana yang menghantarkan kepada perkara yang diharamkan oleh Allah SWT, seperti perzinaan, pelecehan seksual atau kejahatan seksual lainnya. Berdasarkan kaidah syara sarana yang menghantarkan kepada perkara haram maka hukumnya haram. Tidak disyaratkan dalam kaidah ini bahwa sarana itu harus membawa kepada keharaman secara pasti, tetapi cukup dengan dugaan kuat.

Secara sistemik, Islam melarang penyebaran segala bentuk pornografi di tengah masyarakat. Apalagi memproduksi materi pornografi. Perzinaan seperti

yang dilakukan para pelaku pornografi belakangan ini, sanksinya pun sangat tegas yakni rajam bagi yang sudah pernah menikah dan cambuk 100 kali bagi yang bujangan atau perawan. Sanksinya sangat tegas dan cukup berat.

Maka, siapapun yang melakukan atau yang menyebarkan seperti penyedia situs, yang menggandakan CD, produser film, sinetron, dan lain sebagainya, dalam pandangan syariah berarti telah melakukan tindakan pidana.

Kasus semacam itu dalam sistem pidana Islam termasuk dalam *ta'zîr*. Jika terbukti maka bentuk dan kadar sanksinya diserahkan kepada ijtihad qadhi bisa dalam bentuk tasyhir (diekspos), di penjara, dicambuk dan bentuk sanksi lain yang dibenarkan oleh syariah. Jika materi pornografi disebarkan secara luas sehingga bisa menimbulkan bahaya bagi masyarakat, tentu bentuk dan kadar sanksinya bisa diperberat sesuai dengan kadar bahaya yang ditimbulkan bagi masyarakat itu.

Ada pula modus operandi lain, yaitu dengan cara langsung melakukan pembunuhan terhadap korban sebelum ia melakukan perzinaan, seperti peristiwa yang terjadi di Medan, pada awal-awal tahun 2003, yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap keponakan perempuan yang berusia di bawah umur, yaitu anak kandung dari saudara perempuan kandung pelaku. Menurut An-Nawawi, hubungan seksual dengan orang yang sudah meninggal dunia tidak di jatuhkan hukuman *had* tetapi *ta'zir*.⁵⁹ Menurut Imam Malik yang dikutip syarbini Khatib, hukuman bagi orang yang melakukan hubungan seksual dengan orang yang sudah meninggal dijatuhi hukuman *had*.⁶⁰ Menurut Abu Hanifah, orang yang melakukan hubungan seksual dengan orang yang telah meninggal dunia dijatuhi hukuman *had*.⁶¹

Dalam contoh kasus tersebut, pelaku tindak pidana tidak hanya melakukan hubungan seksual dengan mayat semata, tetapi telah didahului oleh perbuatan pidana lain, yaitu melakukan tindak pidana pembunuhan terlebih dahulu, baru melakukan hubungan seksual dengan orang yang telah dibunuh atau mayat

⁵⁹Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam, Menurut Adjaran Ahlus Sunnah* (cet.1 ; Jakarta : Bulan Bintang, 1971), h. 392

⁶⁰*ibid*

⁶¹*ibid*

tersebut. Maka, dalam menentukan sanksi terhadap pelaku tersebut, hendaknya tidak hanya karena tindak pidana pembunuhan saja, tetapi harus disertakan hukuman karena tindak pidana perzinaan atau pemerkosaan, karena tujuan utama dari pelaku setelah menonton VCD porno adalah bukan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan, tetapi tindak pidana perzinaan atau pemerkosaan untuk mencapai kepuasan seksualnya yang tidak terkendali.⁶²

Melihat bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh zina merupakan bahaya yang tergolong besar, disamping juga bertentangan dengan aturan universal yang diberlakukan untuk menjaga kejelasan nasab (keturunan), menjaga kesucian dan kehormatan diri, juga mewaspadaikan hal-hal yang menimbulkan permusuhan serta perasaan benci di antara manusia, disebabkan pengrusakan terhadap kesucian istri, putri, saudara perempuan dan ibu mereka, yang ini semua jelas akan merusak tatanan kehidupan.

Melihat hal itu semua, pantaslah bahaya zina itu setingkat di bawah pembunuhan. Oleh karena itu, Allah SWT menggandeng keduanya di dalam Alquran, juga Rasulullah dalam keterangan hadits beliau.

Dan karena ujung pangkal perbuatan zina yang keji ini tumbuh dari pandangan mata, maka Allah SWT lebih mendahulukan perintah memalingkan pandangan mata sebelum perintah menjaga kemaluan, karena banyak musibah besar yang berasal dari pandangan, seperti kobaran api yang besar berasal dari bunga api. Mulanya hanya pandangan, kemudian khayalan, kemudian langkah nyata, kemudian tindak kejahatan besar (zina).

Islam melarang keras perilaku yang berbau zina karena zina merupakan dosa besar dan disejajarkan dengan dosa syirik dan membunuh. Pelaku zina akan mendapat murka Allah dan diadzab sangat pedih apabila pelakunya mati dalam keadaan tidak bertaubat, beriman dan beramal shalih.

Allah SWT melarang hamba-hambanya mendekati perzinaan, yakni melakukan sebab-sebabnya dan hal-hal yang mendorong kesana. Selain melarang perbuatan zina, Allah menegaskan, bahwa sesungguhnya berzina itu merupakan

⁶²Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap korban Kekerasan seksual (Advokasi Atas Hak Asasi manusia)*, (cet. 1 ; Bandung : Refika : 2001), h. 66-67

perbuatan sangat buruk dan menimbulkan banyak kerusakan. Dengan adanya perzinahan, nasab menjadi kacau, rumah tangga menjadi tidak harmonis, dan tidak jarang timbul pembunuhan.

Perbuatan zina tidak saja keji karena zinanya, dan tidak sejalan dengan harga diri dan menghargai orang lain, tetapi juga membuka jalan keberbagai kejahatan. Merusak dasar keluarga, berlawanan dengan kepentingan bayi dan calon bayi. Dapat menyebabkan adanya pembunuhan, permusuhan, dan merusak nama baik, serta hilangnya harta, dan merusak tali pergaulan untuk selamanya. Bukan saja hal itu harus dihindari sebagai suatu dosa, tetapi setiap pendekatan atau godaan kearah itu harus dihindari.

Namun tentu saja hukuman itu akan membebaskan yang bersangkutan dari adab akhirat bila pelakunya benar-benar mengakui dosanya. Sedangkan yang menyaksikan beratnya pelaksanaan hukuman terhadap zina, akan mencegah terulangnya zina pada orang lain dan tegaknya hukum Allah akan membawa keberkahan bagi kehidupan masyarakat disekitarnya. Karena beratnya hukuman pezina, maka juga tidak boleh gampang menuduh orang berzina, menebar gosip, apalagi tindakan merekam pezina dalam bentuk video atau apapun juga. Karena bagi penuduh orang lain berzina tapi tidak mampu mendatangkan 4 saksi laki-laki yang adil dan benar-benar melihatnya tanpa persekongkolan, meski tuduhan itu benar dan pelaku tidak mengakuinya, maka bagi si penuduh dikenakan hukuman cambuk 80 kali dan tidak diterima kesaksiannya selama-lamanya.

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu. Cara menghukum seperti ini tidak dilakukan kecuali dalam kasus yang sangat tercela dan hanya bila penerima hukuman benar-benar terbukti dengan teramat meyakinkan melakukan sebuah larangan yang berat.

Hukuman rajam khusus diperuntukkan bagi pezina al-muhshan (yang sudah menikah dengan sah) karena ia telah menikah dan tahu cara menjaga kehormatannya dari kemaluan yang haram dan dia tidak butuh dengan kemaluan yang diharamkan itu. Juga ia sendiri dapat melindungi dirinya dari ancaman hukuman zina. Dengan demikian, udzurnya (alasan yang sesuai syara') terbantahkan dari semua sisi . dan dia telah mendapatkan kenikmatan sempurna.

Orang yang telah mendapatkan kenikmatan sempurna lalu masih berbuat kriminal maka kejahatannya (jinayahnya) lebih keji, sehingga ia berhak mendapatkan tambahan siksaan.

Hukuman rajam sebenarnya sudah ada sejak para nabi dan rasul di masa lalu sebelum era umat nabi Muhammad SAW. Hukuman seperti itu berlaku secara resmi di dalam syariat Yahudi dan Nasrani . Dan tidak dikutuk umat terdahulu kecuali karena mereka meninggalkan hukum dan syariat yang telah Allah tetapkan.

Allah SWT kemudian menghapus berbagai macam syariat yang pernah diturunkan-Nya kepada sekian banyak kelompok umat kemudian diganti dengan satu syariat saja, yaitu yang diturunkan kepada umat Muhammad SAW. Namun ternyata Allah SWT masih memberlakukan hukuman rajam. Walaupun dengan pendekatan yang jauh lebih moderat dan manusiawi.

Secara nalar aqidah, dengan tetap diberlakukannya hukuman rajam oleh Allah pada syariat umat Muhammad SAW, kita bisa meyakini bahwa bentuk hukuman seperti ini memang dalam kasus-kasus tertentu masih diperlukan. Meski umat manusia di abad 20 ini seringkali menginginkan dihapuskannya hukuman mati, namun ternyata hukuman mati itu masih diperlukan, bahkan di beberapa negara yang maju, masih berlaku dan tetap terjadi sampai sekarang.

Dan tentu sangat logis bila umat Islam dengan latar belakang kepatuhan dan ketundukan kepada originalitas agamanya, pada hari ini masih memberlakukan hukuman rajam buat pemeluk agamanya. Tidak ada cela dan cacat dalam pelaksanaan hukuman seperti itu, apalagi kalau dibandingkan dengan tragedi pembantaian massal yang dilakukan oleh negara maju terhadap dunia ketiga, maka pelaksanaan hukuman rajam buat pelanggar kesalahan berat menjadi tidak ada artinya.

Dalam syariat Islam, pelaksanaan rajam bisa dilakukan namun harus ada ketetapan hukum yang sah dan pasti dari sebuah mahkamah syariah atau pengadilan syariat. Dan semua itu harus melalui proses hukum yang sesuai pula

dengan ketentuan dari langit yaitu syariat Islam. Allah telah menetapkan bahwa hukuman zina hanya bisa dijatuhkan hanya melalui salah satu dari dua cara :

a. Ikrar atau pengakuan dari pelaku

Pengakuan sering disebut dengan `sayyidul adillah`, yaitu petunjuk yang paling utama. Karena pelaku langsung mengakui dan berikrar di muka hakim bahwa dirinya telah berzina, maka tidak perlu adanya saksi-saksi

b. Adanya saksi yang bersumpah didepan mahkamah

Ketetapan bahwa seseorang telah berzina juga bisa dilakukan berdasarkan adanya saksi-saksi. Namun persaksian atas tuduhan zina itu sangat berat, karena tuduhan zina sendiri akan merusak kehormatan dan martabat seseorang, bahkan kehormatan keluarga dan juga anak keturunannya. Sehingga tidak sembarang tuduhan bisa membawa kepada ketetapan zina. Dan sebaliknya, tuduhan zina bila tidak lengkap akan menggiring penuduhnya ke hukuman yang berat.

Dan syarat yang paling penting adalah bahwa perbuatan zina itu dilakukan di dalam wilayah hukum yang secara formal menerapkan hukum Islam. Syarat lainnya adalah bahwa hukuman zina itu hanya boleh dilakukan oleh pemerintah yang berdaulat secara resmi. Bukan dilakukan oleh orang per orang atau lembaga swasta. Ormas, yayasan, pesantren, pengajian, jama'ah, majelis taklim, perkumpulan atau pun majelis ulama tidak berhak melakukannya, kecuali ada mandat resmi dari pemerintahan yang berkuasa.

Sehingga semua kasus zina di Indonesia ini, tidak ada satu pun yang bisa diterapkan hukum rajam, sebab secara formal pemerintah negara ini tidak memberlakukan hukum Islam. Tentu saja perbuatan itu tetap harus dipertanggung-jawabkan di mahkamah tertinggi di alam akhirat nanti. Baik bagi si pelaku zina maupun di penguasa yang tidak menjalankan hukum Allah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pornografi yaitu disebabkan oleh Keterbatasan lapangan kerja yang dapat memicu seseorang melakukan tindak pidana pornografi seperti pembuatan dan pengedaran VCD porno yang hasilnya sangat menjanjikan dapat mengubah keadaan ekonomi seseorang.

Keterbatasan pengetahuan tentang agama juga dapat memicu seseorang melakukan tindak pidana baik berupa kekerasan seksual maupun pelecehan.

Pornografi sangat memberikan pengaruh buruk dalam kehidupan masyarakat baik pada orang dewasa maupun pada anak-anak yang dapat merusak moral generasi bangsa

Pornografi dalam ajaran agama Islam, merupakan suatu bentuk pelanggaran yang menyalahi nilai dan norma yang telah diatur didalamnya. Islam lebih mengenal hal itu dengan istilah aurat. Yang mana aurat tersebut seharusnya tertutup dari pandangan siapapun yang melihatnya, tetapi pada kenyataannya menjadi hal yang biasa untuk diperlihatkan. Ajaran agama Islam menjelaskan bahwasannya memperlihatkan aurat adalah suatu perbuatan yang mengarah pada terjadinya zina. Dan zina itu secara tegas dilarang dalam Islam

B. Saran

Tidak dapat dipungkiri bahwa pornografi merupakan suatu masalah klasik yang selalu menjadi bagian dalam segala hal yang berkaitan dengannya. Sulitnya untuk menyelesaikan masalah pornografi dikarenakan karena hal tersebut berkaitan dengan naluri manusia sendiri dan tergantung dengan nilai dan norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Hal demikian sering menjadi alasan bahwa suatu perangkat hukum tertentu tidak cukup untuk mengupayakan pemberantasannya.

Pornografi sendiri telah dilarang secara total dengan ketentuan dalam Undang-undang Pornografi, namun pelarangan secara total tersebut ternyata tidak efektif. Beredarnya pornografi secara bebas diperparah dengan minimnya penegakan hukum di negeri ini. Tanpa adanya penegakan hukum yang secara konsisten memberantas pornografi, berapa banyak pun undang-undang yang dibuat untuk mengatasi masalah ini tidak akan berjalan dengan efektif. Masalah penegakan hukum yang minimalis ini mengakibatkan masyarakat menjadi tidak takut akan ancaman hukuman yang ada, baik ringan maupun berat.

Pengambilan hukum tindak pidana pornografi dan sanksinya dalam pandangan hukum Islam di qiyaskan dengan kejahatan berbagai macam tindak pidana, bisa dihukum dengan hukuman zina hudud, ta'zir, qisas dan sebagainya. Karena kejahatan pornografi, tidak ada secara langsung yang mengatur hukumnya dalam hukum Islam.

Alternatif solusi yang dapat digunakan adalah dengan membatasi peredaran pornografi, dengan terlebih dahulu mengadakan perbaikan mengenai kategori- kategori pornografi seperti yang telah ada dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian atas pelanggaran dari pembatasan tersebut dikenakan sanksi yang lebih berat dari sebelumnya.

Alternatif solusi lain, yaitu mengajak masyarakat untuk tanggap dan secara aktif bertindak akan hal-hal yang dapat merusak moral masyarakat. Pornografi yang tingkat kerelativitasannya tinggi ini (karena perbedaan nilai antara budaya satu dengan yang lainnya) harus ditentang dengan kampanye besar-besaran. Masyarakat harus mengambil keputusan untuk tidak menyukai maupun

mengonsumsi pornografi atas kesadarannya sendiri. Dengan demikian, seperti apapun perangkat hukumnya diharapkan moralitas masyarakat khususnya generasi muda akan terjaga.



DAFTAR PUSTAKA

- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1993
- Nurun Najwah, *Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Perspektif Hadis dalam Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*. Yogyakarta , 2002.
- Chazawi Adami, *tindak pidana pornografi*. Surabaya : PMN, 2009
- _____ *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004
- _____ *Kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Hukum pornografi kumpulan perundang-undangan tentang pornografi*. Yogyakarta : Pustaka Mutika, 2010
- Said Agil Husain Almunawar. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Permadani, 2004.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2004
- Ali Muhammad Daud, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum islam di Indonesia*, Jakarta : raja grafindo persada, 1998
- Bungin Burhan, *pornomedia*, Jakarta : prenada media, 2005
- Djubaedah Neng. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta : Kencana Prenadana Media Group, 2009
- Departemen Agama Republik Indonesia. *AlQur'an dan Terjemahan*, Jakarta :1990
- Poernomo Bambang. *Asas-asas hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994
- Sugiono, *metode penelitian kuantitatif,kualitatif dan R&D*, Bandung : ALFABETA, 2009

- A. Karim Adiwarmarman, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008
- Asti Badiatul Muchlisin, *Gurita Pornografi Membelit Remaja*, Grobongan, Oase Qalbu, 2010
- Hamzah Andi, *Pornografi Dalam hukum Pidana*, Jakarta, Bina Mulia ,1987
- _____ *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986
- Atmasasmita Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Eresco, 1988
- soejono, *Sosio Kriminologi*, Bandung, Alumni, 1976
- Talsim Adrina, *Bila Perkosaan Terjadi*, Jakarta, Kalyanamitra, 2002
- Piliang Yasraf Amir, *Posrealitas; Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*, Yogyakarta dan Bandung, Jalasutra, 2009
- Lamintang dan Lamintang Theo, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatuhan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- E.Y Kanter dan SR Sianturi, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, 2003
- Sony Set., *500+ Gelombang Video Porno Di Indonesia*, Yogyakarta, CV. Andi Offset, 2007
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1993
- Rachim Alex , *Pornografi Dalam pers, Sebuah orientasi*, Jakarta, dewan Pers, 1977
- Rahmat Jalaluddin, *Islam Aktual, Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Bandung, Mizan, 1999

Ma'sum Ma' ruf, *Karakter Zhohir Wanita Sholihah*, Rembang, Ma'sum press, 1995

Tamimi Shaleh, *Onani Masalah Anak Muda*, Jakarta, Gema Insani, 2003

Sarwono Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Qardhawi Yusuf, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Solo, Era intermedia, 2000

Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam, Menurut Adjaran Ahlus Sunnah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1971

Wahid Abdul dan Irfan Muhammad, *Perlindungan Terhadap korban Kekerasan seksual (Advokasi Atas Hak Asasi manusia*, Bandung, Refika, 2001

Aripurnami Sita, *Pornografi Dalam Perspektif Perempuan*, Jakarta, I IND-HILL, 1997

Syarifah, *Kebertubuhan Perempuan Dalam pornografi*, Bandung, Mizan, 1995

Solihin, *Jangan Jadi Bebek*, Jakarta, Gema Insani, 2002

Lesmana Tjipta, *Pornografi dalam Media Massa*, Jakarta, Puspa Swara, 1994

Soerodibroto Soenarto, *KUHAP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hage Raad*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1994

R. Sugandi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional, 1980

http://www.bloggaul.com/mujahid-bertopeng/readblog/34408/batasan-pornografi-dan_pornoaksi-dalam-islam akses pada tanggal 23 agustus 2011

http://warnaislam.com/umum/renungan/2008/10/21/4996/Dampak_pornografi_bagi_perkembangan_Anak.htm diakses tanggal 12 Agustus 2011

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Eka Mustafia biasa dipanggil Echa, Lahir di Sengkang, 12 Januari 1989.

Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Sarifuddin dan Hapsa.

memiliki Hobby bermain musik dan mendengarkan musik. Jenjang

Pendidikan formal yang pernah ditempuh TK Pertiwi Pekkabata Kabupaten Pinrang tahun 1990-1992, SD. NEGERI 28 Pinrang tahun 1994-2000, SMP NEGERI 01 DUAMPANUA tahun 2000-2003 kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas SMA NEGERI 03 SENGKANG Kabupaten Wajo tahun 2003-2006 dan tahun 2007 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pernah menjadi anggota tim trainer Mahasiswa yang bersifat sosial dalam pengembangan jiwa intreprenur ditingkat mahasiswa. Aktif berkontribusi baik dalam pemikiran maupun berupa tenaga, Sering juga melakukan beberapa percobaan-percoabaan ilmiah di tingkat masyarakat yang merupakan bagian dari aktifitas harian yang dilakukan dilingkup kampung halaman.